



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

RISALAH

**RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI; KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA; KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN (BASARNAS)**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Raker dan RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 24 Agustus 2022
Waktu : Pukul 10.00 s.d. 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom
Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : Ir. Ridwan Bae (F-P. GOLKAR) – Wakil Ketua Komisi
V DPR RI
- Acara : 1. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
APBN TA. 2021;
2. Realisasi APBN TA. 2022 sampai dengan bulan
Agustus 2022;
3. Membahas RKA K/L TA. 2023 dalam Nota
Keuangan RAPBN TA. 2023;
4. Membahas usulan program-program yang akan
didanai oleh DAK (Kementerian Desa PDTT)
berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR
RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
43 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
10 dari 11 orang Anggota
1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
3. Mochamad Herviano
4. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.
5. Sukur H. Nababan, S.T.
6. Ir. Sudjadi
7. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
8. H. Irmadi Lubis
9. Ir. Effendi Sianipar
10. Harvey B. Malaihollo

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
7 dari 8 orang Anggota
 1. Ir. Ridwan Bae
 2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
 3. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
 4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
 5. Ilham Pangestu
 6. Muhammad Fauzi, S.E.
 7. Ir. H. Anang Susanto, M.Si.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
4 dari 7 orang Anggota
 1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
 2. Sudewo, S.T., M.T.
 3. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
 4. Drs. H. Mulyadi, M.MA.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
5 dari 6 orang Anggota
 1. Roberth Rouw
 2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
 3. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
 4. Drs. H. Soehartono, M.Si.
 5. Sri Wahyuni

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
5 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud
 2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
 3. Sofyan Ali, S.H.
 4. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
 5. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.
 3. Lasmi Indaryani, S.E.
 4. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
2 dari 5 orang Anggota
 1. Ir. H. Sigit Sosiantomo
 2. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

4 dari 5 orang Anggota

1. H.A. Bakri H. M., S.E.
2. Athari Ghauthi Ardi
3. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
4. H. Boyman Harun, S.H.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS.
2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (Dr. (HC) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd.)
2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika RI (Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.)
3. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)/ BASARNAS (Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, M.Han.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / F – P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE):

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta jajarannya,
Yang terhormat Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) beserta seluruh jajarannya serta hadirin yang kami hormati,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat walafiat baik secara fisik maupun secara virtual dari tempat masing-masing.

Menurut laporan dari Sekretariat, daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI telah ditandatangani sebanyak 27 orang di mana 12 orang hadir fisik dan 15 orang adalah virtual dengan jumlah 7 fraksi sehingga telah memenuhi kuorum. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 281 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkan kami membuka rapat pada hari

ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1). Rapat Kerja RDP ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan beserta jajarannya yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini untuk hadir secara fisik.

Pimpinan Anggota Komisi V DPR RI, Menteri dan Kepala Badan yang kami hormati,

Berdasarkan surat Badan Anggaran mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2023, maka hari ini Komisi V DPR RI melaksanakan Raker dengan mitra kerjanya dengan agenda membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2021, realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023, serta usulan program-program yang akan didanai DAK Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi berdasarkan kriteria teknis dan Komisi, dari Komisi.

Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 98 ayat (2) dan (3) serta peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib pasal 59 ayat 2 dinyatakan bahwa tugas komisi dalam bidang anggaran meliputi diantaranya membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian atau Lembaga yang menjadi mitra kerja komisi dan mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 serta Realisasi Anggaran sampai Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LKPP Tahun 2021, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian sedangkan realisasi anggaran sampai bulan Agustus Tahun 2022 sebesar 47,91%.
2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LKPP Tahun 2021, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, sedangkan realisasi anggaran sampai bulan Agustus Tahun 2022 sebesar 40,11%
3. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LKPP Tahun Anggaran 2021, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Basarnas mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian sedangkan Realisasi Anggaran sampai bulan Agustus 2022 sebesar 46,02%.

Saya kira ketiga lembaga ini perlu kita beri apresiasi *applause* kepada mereka karena semuanya adalah mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian.

Terkait dengan agenda berikutnya yaitu pembahasan RKA K/L pada Kementerian Desa dan Lembaga Tahun Anggaran 2023 perlu kiranya kita bangun kesepahaman bersama bahwa rapat kerja pada hari ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 yang telah kita laksanakan pada bulan Juni 2022 lalu.

Pimpinan Anggota Komisi V DPR RI dan Para Menteri yang kami hormati,

Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam RAPBN Tahun 2022, memperoleh anggaran sebesar 2,9 Triliun. Komposisi anggaran tersebut digunakan untuk program dukungan manajemen dan untuk Program Daerah Tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan, dan transmigrasi. Sementara DAK afirmasi atau DAK transportasi pedesaan perlu mendapat penjelasan secara komprehensif.

Selanjutnya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendapat Alokasi Anggaran Tahun 2023 sebesar 3,10 Triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program meteorologi klimatologi dan geofisika serta mendukung manajemen. Sementara alokasi anggaran Badan Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 1,8 Triliun yang diperuntukan untuk program pencarian dan pertolongan pada kecelakaan dan bencana serta dukungan manajemen.

Pada kesempatan terakhir RDP hari ini, Komisi V DPR RI hendak mendapatkan penjelasan dari Menteri Desa PDT dan Transmigrasi serta masing-masing kepada Kepala BMKG dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terkait dengan pembicaraan RKA atau RKL dan RKP dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023.

Pimpinan Anggota Komisi V DPR RI, Menteri, dan Kepala Badan yang kami hormati,

Demikian pengantar dari kami. Selanjutnya, kami persilakan kepada Menteri Desa PDT dan Transmigrasi serta Kepala Badan BMKG dan Kepala BNPP untuk menyampaikan penjelasan sesuai dengan agenda rapat kita pada hari ini. Kami persilakan mungkin Menteri PDT dulu atau, Menteri dulu ya, silakan, Pak Menteri.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI (Dr. (HC) Drs. A. HALIM ISKANDAR, M.Pd.):

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Shalom,
Om Swastiastu,
Salam kebajikan,

Yang saya hormati para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI, Kepala BMKG dan Kepala Basnas, dan seluruh yang hadir,

Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pimpinan Rapat kepada kami dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada empat hal yang akan kami laporkan yang pertama terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2021 tepatnya untuk Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian yang kedua realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dan yang ketiga Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023 dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2023 dan yang keempat usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dan Komisi.

Pimpinan Sidang dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,

Yang pertama, kami akan melaporkan laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2021 sebagaimana tadi sudah disampaikan Pimpinan Komisi, *alhamdulillah* hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2021. Badan Pemeriksa Keuangan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2021.

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin melaporkan secara singkat. Pertama, laporan realisasi anggaran, yang kedua neraca, yang ketiga laporan operasional, dan yang keempat laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir ada lampiran yang jumlahnya banyak ketika dibutuhkan nanti akan kita kirimkan.

Pertama terkait dengan realisasi anggaran ketika kita sandingkan antara Tahun 2020 dengan 2021 di mana tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Jadi, hampir sama jumlah belanja dan serapannya 95,535 untuk 2021. Kemudian untuk 2020, 95,676. Kemudian, realisasi penerimaan bukan pajak 6.340.076.578 yang berasal dari pengembalian belanja barang tahun anggaran yang lalu serta pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sedikit menurun dibandingkan 2020 disebabkan masih pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan serta pengembalian belanja Tahun Anggaran yang lalu. Sementara yang lain tidak ada perubahan yang signifikan.

Kemudian, yang terkait dengan posisi neraca antara Desember 2021 dengan Desember 2020 di mana terjadi kenaikan aset lancar pada pos persediaan diserahkan kepada masyarakat dikarenakan pada Tahun 2021 masih dalam proses penyerahan atau hibah ke masyarakat. Ini sebenarnya

adalah posisi pada 2020 sampai sebelumnya sedangkan untuk 2021 penyerahan hibah kepada masyarakat sudah selesai di awal 2022. Ini masih menjadi PR kami untuk penuntasan di 2020 dan ke belakang 2029, 2019, 2018 dan seterusnya.

Kemudian, terjadi penurunan aset tetap namun tidak signifikan karena adanya transfer keluar hibah keluar, penghapusan dan koreksi pencatatan juga terjadi penurunan piutang jangka panjang karena terdapat pembayaran piutang tuntutan ganti rugi juga terjadi penurunan aset lainnya karena adanya penghapusan hibah keluar, transfer keluar, dan juga terjadi penurunan kewajiban jangka pendek dibanding Tahun Anggaran 2020 karena sudah terbayarkan utang kepada pihak ketiga dari satker. Ini posisi neraca sandingan antara 2020-2021.

Sedangkan, sandingan laporan operasional tingkat kementerian dalam hal ini terdapat kenaikan pada beban persediaan hal ini dikarenakan penurunan level PPKM yang mengakibatkan pegawai melaksanakan WFO. Sehingga pemakaian alat tulis komputer bertambah, persediaan konsumsi juga bertambah. Jadi, kenaikannya karena dulunya WFH kemudian sudah mulai turun covidnya akhirnya banyak yang WFO. Kenaikan perjalanan dinas juga karena sudah landainya covid, kemudian terjadi penurunan beban persediaan diserahkan kepada masyarakat karena pada Tahun Anggaran 2021 proses hibah masih banyak yang belum selesai. Tadi sudah kami laporkan secara lebih rinci kenapa ini terjadi.

Pimpinan Komisi V dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,

Kemudian yang terkait dengan laporan perubahan ekuitas disandingkan antara 2020 dan 2021, di mana terdapat kenaikan ekuitas akhir sebesar 0,875% dari semula Rp2.739.050.841.605 di Tahun 2020 menjadi 2.763.006.771.618 di Tahun 2021, ada kenaikan 0,875%.

Para Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,

Selanjutnya kami akan melaporkan realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022. Sebagaimana dimaklumi dan sudah pernah kita laporkan pada Rapat Kerja dengan Komisi V di mana untuk Tahun Anggaran 2022 terjadi dua *automatic adjustment*. Yang pertama tahap pertama 5% dari Pagu APBN Tahun Anggaran 2022 kemudian ini sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor sekian gitu, S1088 tanggal 29 November 2021. Kemudian yang kedua ada *automatic adjustment* belanja KL Tahun Anggaran 2022 Tahap II sesuai dengan surat Menteri Keuangan tanggal 23 Mei 2022 hal penambahan *automatic adjustment* belanja Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp196.430.377.000.

Kemudian yang terkait dengan kinerja serapan anggaran realisasi per jenis belanja dalam rupiah, belanja pegawai 62,6% realisasinya. Kemudian belanja barang 46,5%, belanja modal 25,3%, total 47,91% per 22 Agustus. Sedangkan, per 24 Agustus hari ini ada peningkatan sedikit menjadi 48,8%. Sedangkan, perbandingan kinerja serapan anggaran antara Tahun 2021

dengan Tahun 2022 ada sedikit peningkatan di mana 2021, 47 atau 48 koma sekian tadi kemudian Tahun 2020 pada posisi yang sama penyerapannya 47,922, 48,08 sedangkan 2021, 47,73%.

Pak Ketua dan Anggota Komisi V yang saya hormati,

Terkait dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Nota Keuangan RAPBN Tahun 2023 dapat kami laporkan sebagai berikut. Yang pertama, tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *desain job*, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, respon terhadap perubahan iklim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi dan pembangunan Ibukota Nusantara.

Sedangkan, peran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mendukung kebijakan *Major Project* RKP Tahun 2023. Pertama di bidang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kita ada di BLT dan desa. Peningkatan sentra pangan di kawasan transmigrasi. Kemudian terkait dengan kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, dukungan Kementerian Desa pada konvergensi *stunting* di desa, pendidikan vokasi bagi masyarakat melalui pelatihan di balai latihan masyarakat.

Kemudian program yang ketiga penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*, dukungan Kementerian Desa membuka lapangan kerja di desa melalui Padat Karya Tunai Desa. Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha Kementerian Desa mendukung pada posisi revitalisasi Bumdes atau Bumdesma dan pengembangan desa wisata.

Kemudian, terkait dengan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, kita memberikan dukungan pada kawasan industri prioritas dan *smelter*, kita tidak masuk di situ. Kemudian yang keenam, pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim. Kita ada pada pengembangan desa perhutanan sosial, rehabilitasi mangrove atau pengelolaan kawasan pesisir, kemudian yang ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur desa antara lain air bersih dan sanitasi. Kita ada pada posisi program desa cerdas atau *smart village* dan pemberdayaan masyarakat dalam Pamsimas.

Kemudian yang terakhir, pembangunan Ibukota Nusantara kita ada pada posisi dukungan inventarisasi dan pemetaan HPL kawasan transmigrasi di sekitar IKN dan satu hal yang sedang kita usulkan yaitu penguatan desa-desa di *ring 1* IKN untuk tetap menjadi desa, tidak menjadi Kelurahan sehingga bisa menjadi etalase desa di Indonesia di wilayah IKN.

Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,

Pagu dan Realisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk Tahun 2023 sebesar 3 Triliun 116, sedangkan realisasi 1,489 atau setara 47,83%, sedangkan Pagu Anggaran menurut program Tahun Anggaran 2023, ini ada Pagu Indikatif itu 3 koma 3 Triliun 736.483. Kemudian, pada Pagu Anggaran mengalami penurunan sedikit jadi 2 koma 2.997.030.851.000 itu disebabkan karena terdapat penyesuaian alokasi hibah luar negeri untuk program INAI yang semula di Pagu Indikatif Rp11.589.052.000 menjadi sebesar Rp7.883.420.000 ini lebih awal bisa kita laksanakan sehingga nanti di 2023 karena sudah kita tarik di 2022 tidak numpuk program-program ini sehingga pada akhir pelaksanaan program bisa kita laksanakan dengan tuntas.

Kemudian, terkait dengan pagu anggaran untuk Eselon I Tahun Anggaran 2023, Inspektorat Jenderal, Pagu Anggaran 2023, Rp51.750.000.000, kemudian Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Rp229.216.528.000, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp211.470.248.000, Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Rp93.628.634.000, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp258.286.559.000. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp1.792.892.120.000. Sekretariat Jenderal Rp225.000.000.000, Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp134.786.762.000, total Rp2.997.030.851.000.

Adapun *output* prioritas pada rencana kerja pada Pagu Anggaran Tahun 2023 sebagaimana yang kita laporkan Sarpras desa wisata volume 120 desa. Pengendalian penggunaan dana desa 74.961 desa sesuai dengan jumlah desa yang didapat register dari Kementerian Dalam Negeri dan mendapatkan Alokasi Dana Desa. Penanganan konvergensi stunting 390 kelompok, pasar prokades di kawasan perdesaan 20 unit, peningkatan akuntabilitas sosial dan kompetensi masyarakat P3PD PLN Bank Dunia 320 desa, 40 Miliar. Jalan di kawasan pedesaan 6 kilometer 6,7 Miliar, pengembangan amenitas wisata 8 unit 4,5 Miliar. *Output* prioritas untuk Rencana Kerja Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, fasilitasi desa ekspor 11 desa 4,25 Miliar. Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu, TEKAT PHLN IFAT 1.110 kelompok 71 Miliar.

Bantuan Pengembangan Usaha Bumdesa 500 Bumdesa 39,5 M, pengembangan Bumdesa bersama 75 Bumdesa, 10,3 M. Bantuan Sarana Prokades Perhutanan Sosial, 6 desa 2,4 M. *Output* prioritas pada Rencana Kerja Pagu Anggaran Tahun 2023 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, promosi produk unggulan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tiga paket 1,5 M. Fasilitasi investasi Desa Daerah Tertinggal dalam fasilitasi, enam Kabupaten 1 M. fasilitasi kewirausahaan Desa Daerah Tertinggal dan transmigrasi enam paket 3,5 M, bimtek pelaku usaha Prokades 100 orang, 1,5 M. *Output* prioritas

pada Rencana Kerja Pagu Anggaran Tahun 2023 Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, tenaga kerja di daerah tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya 595 orang, 5 M. Jalan desa strategis yang ditingkatkan di kawasan perbatasan mandat Inpres 1 Tahun 2021 1,10 km, 4,399 M.

Peningkatan kapasitas masyarakat bidang pariwisata, pertanian, kelautan, pesisir dan perikanan di daerah khusus 620 orang 3,94 M. *Pilot Project* prasarana air bersih di daerah tertinggal tiga unit 4,50 M. Kemudian, untuk Direktorat Jenderal percepatan pembangunan daerah tertinggal sarana pasca panen komoditas pertanian dan kelautan di daerah tertinggal, empat unit 1,3 M. Gudang produksi hasil Prokades untuk Kopra di daerah tertinggal dua unit 1,52 M. Sarana pengelolaan kawasan pesisir, pengolahan produk turunan mangrove di daerah tertinggal delapan unit, 2,75 M dan embung di kawasan perbatasan negara mandat Inpres 1 Tahun 2021 dua unit, 3,178 M.

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, jembatan di kawasan transmigrasi volume 217 meter, 13,16 M. Sarana air bersih 451 unit, 3,56 M, sarana produksi pertanian 28 unit, 7,5 M, pengurusan sertifikat hak milik tentu tanah transmigrasi 1.820 orang 4,67 M. Fasilitas pencadangan tanah transmigrasi satu daerah 1,15 M, jalan di kawasan transmigrasi 55,92 kilometer, 39,6 M dan drainase di kawasan transmigrasi 5,63 kilometer 5,67 Miliar.

Kemudian untuk Direktur Jenderal pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk lanjutannya fasilitas umum di kawasan transmigrasi 23 unit 12,4 M, bangunan air di kawasan transmigrasi dua unit 2,18 M, pengurusan SK HPL satu daerah 1,15 M, catu pangan jaminan hidup transmigran 977 keluarga, 11,28 M, sarana perumahan yang dibangun di kawasan transmigrasi 200 unit, 23,73 M. Bantuan peralatan pasca panen sembilan satuan pemukiman 2,78 M.

Kemudian, untuk Inspektorat Jenderal Layanan Pengawasan Internal pada Sekjen dan BPSDM tiga layanan. Layanan pengawasan internal pada Dirjen PEID dan PPDT dua layanan. Layanan pengawasan internal pada Dirjen PPK Trans dan PBI dua layanan. Layanan pengawasan internal pada Dirjen PDP dan Irjen tiga layanan dan layanan investigasi khusus dan pengawasan penggunaan dana desa dua layanan 3,3 M.

Yang terakhir Sekretariat Jenderal ini ada layanan perencanaan dan kerja sama dan dukungan PDLB PHLN Bank Dunia terima layanan, layanan kepegawaian dan organisasi, empat layanan. Layanan Hubungan Masyarakat, empat layanan. Layanan hukum, empat layanan. Layanan keuangan dan barang milik negara, empat layanan. Layanan umum dan pengadaan, empat layanan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, peningkatan pembelajaran masyarakat melalui Akademi Desa P3PD PHLN Bank Dunia 32.000 orang, 19,9 M. Pendampingan desa 35.000 orang, di 74.962 desa, 1,542 Triliun, peningkatan kapasitas ASN 500 orang, 3,5 peningkat, pelatihan

masyarakat 7.500, orang 32 M. Peningkatan kapasitas pendamping desa P3PD PHLN Bank Dunia 15.800 orang, 52,5 M.

Kemudian, Badan Pengembangan Dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *background study* RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045 bidang Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, enam dokumen. Layanan data dan informasi pengembangan sistem dan teknologi informasi, tiga layanan. Layanan jaringan komunikasi data, satu layanan. Pengembangan desa digital melalui *Smart Village* P3PD PHLN Bank Dunia, 1000 desa, 43,2 M.

Adapun lokus kegiatan pada Rancangan Kegiatan Kerja Pagu Anggaran Tahun 2023 yang pertama adalah mandat RPJMN 2020-2024. Rencana Kerja Pemerintah, RKP Tahun 2023 direktif atau arahan presiden, prioritas Kementerian, rencana strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 dan hasil kunjungan kerja dan aspirasi dari mitra Komisi V DPR RI. Usulan lokasi desa kami harapkan untuk bisa segera disampaikan setelah pembahasan Pagu Anggaran sesuai dengan Nota Keuangan untuk penyesuaian pada Krisna, Renja, Rencana Kerja Pagu Alokasi Tahun 2023.

Untuk *detailingnya* lebih cepat lebih bagus Pak Ketua dan para Anggota Komisi V sehingga nanti yang terkait dengan aspirasi dan usulan Bapak-Ibu sekalian bisa segera diakomodasikan.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, para Pimpinan dan Anggota Komisi V,

Terkait dengan arah kebijakan DAK afirmasi, DAK transformasi pedesaan itu adalah yang pertama dukungan terhadap RPJMN 2020 dan sampai 2024. Prioritas nasional kedua, kegiatan prioritas keempat yaitu pengembangan daerah tertinggal kawasan perbatasan, pedesaan dan transmigrasi. Arah kebijakannya peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas penumpang dan barang terhadap pusat pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah di daerah afirmasi. Dengan tujuan mengurangi kesenjangan wilayah dengan meningkatkan mobilitas dan konektivitas bagi penumpang dan barang melalui penyediaan sarana dan prasarana transformasi di daerah afirmasi. Sasarannya meningkatnya kualitas pelayanan dan pergerakan penumpang dan barang menuju pusat pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah didukung oleh penyediaan energi di daerah afirmasi.

Sedangkan, posisi DAK transformasi pedesaan dalam kebijakan DAK fisik Tahun Anggaran 2017 sampai 2023. 2017 sampai 2020, DAK afirmasi, 2021 *mainstreaming* lokus daerah afirmasi dalam DAK reguler dan penugasan. Kemudian 2022, *mainstreaming* lokus daerah afirmasi dalam DAK reguler dan penugasan tematik, juga DAK penugasan dan tematik III yaitu peningkatan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sedangkan untuk 2023, DAK fisik penugasan, DAK

tematik III, peningkatan konektivitas dan elektrifikasi untuk pembangunan inklusif di daerah afirmasi.

2023 ini DAK transformatif pedesaan menjadi bidang dalam penugasan tematik III, fokus pada peningkatan konektivitas daerah afirmasi pada kawasan barat dan timur Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi kapasitas fiskal daerah dan indeks kesenjangan, Sedangkan proses perencanaan DAK transformasi, kita laporkan sebagai berikut. Maret sampai April *multilateral meeting*, DAK fisik Bappenas, Kemenkeu, dan Kementerian/Lembaga teknis menyepakati jenis bidang arah kebijakan dan menu. Kemudian April-Mei forum *top-down* terkonfirmasi. Juni-Juli fase pengusulan kegiatan, Juli fase penilaian awal usulan, Bappenas dan Kementerian Desa melakukan penilaian awal usulan yang telah diinput Pemda. Agustus saat ini forum sinkronisasi dan harmonisasi Kemendesa dan Bappenas melakukan pembahasan hasil penilaian dan cek kesiapan pelaksanaan dengan Pemda.

Minggu pertama September Rancangan Pagu Alokasi per daerah, minggu kedua sampai minggu keempat September pembahasan anggaran TKDD di DPR RI. Oktober penetapan Pagu Alokasi Undang-Undang APBN. November forum finalisasi dan Desember pelaksanaan sampai dengan T+1. Sedangkan, peran Kementerian/Lembaga dalam perencanaan transformasi, untuk Kementerian Desa tugasnya adalah mengkoordinasi proses perencanaan DAK transformasi pedesaan dengan Pemda melalui forum asistensi, forum sinkronisasi usulan, dan forum finalisasi rencana kegiatan. Bersama dengan Bappenas menetapkan kriteria teknis menu kegiatan DAK transformasi pedesaan, mengusulkan menu kegiatan DAK transformasi pedesaan ke Bappenas dan Kementerian Keuangan bersama Bappenas melakukan penilaian usulan kegiatan berdasarkan kriteria teknis dan yang terakhir menyusun regulasi tentang petunjuk operasional pelaksanaan kegiatan DAK transformasi pedesaan dengan mengacu kepada petunjuk teknis DAK atau DAK fisik.

Sedangkan, perkembangan alokasi dan realisasi DAK transportasi pedesaan dari 2017 sampai dengan 2023. di mana untuk 2023 dirancang 750 Miliar, ini tahap perencanaan berdasarkan Pagu Indikatif. Kemudian untuk lokasi prioritas DAK transformasi pedesaan, Tahun 2023 ini, nanti ada 84 Kabupaten daerah afirmasi di kawasan barat dan timur Indonesia dengan kriteria kapasitas fiskal dengan kategori sedang sampai sangat rendah kemudian indeks keterjangkauan dengan kategori rendah.

Sedangkan lokasi prioritas Tahun Anggaran 2023 itu sebagaimana terlampir Anggaran 2022 juga kita lampirkan. Kemudian, menu juga kita laporkan dan beberapa rinciannya juga sudah kita siapkan lampirannya untuk dibahas di dalam RDP.

Saya pikir itu Pak Pimpinan Komisi, dan seluruh Anggota Komisi V yang bisa kita laporkan, demikian terima kasih atas waktunya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Makasih Pak Menteri, kita persilakan Bu Kepala BMKG.

**KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA RI
(Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc. Ph.D):**

Bismillahirrohmanirohim.

**Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi V DPR RI beserta seluruh Anggota Komisi V DPR RI, dan juga
Yang saya hormati Bapak Menteri Desa dan Transmigrasi, dan juga
Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Basarnas,
Serta Bapak-Ibu hadirin sekalian yang saya hormati,**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan Komisi V dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V DPR RI yang kami muliakan,

Perkenankanlah kami menyampaikan laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2021 beserta realisasi anggarannya, di Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Agustus ini dan RKA K/L, BMKG Tahun Anggaran 2023 dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023.

Mohon izin, Bapak-Ibu Anggota dewan dan Pimpinan dewan yang kami muliakan, kami awali dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2021.

Dari Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2021 dan 2020, kami mendapatkan PNPB dari target sekitar 70,867 Miliar. Realisasinya adalah 65,377 Miliar atau 92,25%. Sementara itu untuk Tahun 2020, kami mencapai realisasi 103,84% dari 93,6 Miliar dengan realisasi menjadi 97,2 Miliar. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun Anggaran 2021 kami mendapatkan penurunan PNPB akibat dari pengurangan layanan penerbangan di masa pandemi.

Kemudian, uraian belanja untuk Pagu Tahun Anggaran 2021, total sebesar 2,9 T terdiri dari Belanja Pegawai 619 Miliar, eh, 620 Miliar kurang lebihnya. Belanja barang sekitar 1,071 Triliun dan belanja modal sekitar 1,211 Triliun. Realisasinya adalah 2,462 Triliun atau sebesar 84,84% yang terdiri dari, belanja pegawai 611 Miliar dan belanja barang sekitar 1 Triliun, belanja modal sekitar 840 Miliar. Di Tahun Anggaran 2020, kami mencapai realisasi 92,60% dengan Pagu 2,241 Triliun dan realisasi 2,076 Triliun.

Kemudian, laporan neraca periode 31 Desember 2021 dan 2020, secara umum terjadi penambahan ekuitas sebesar 373 Miliar atau Rp373,291 Miliar dari 6 Triliun, 6,6 Triliun pada tahun, Rp6,6 Triliun pada Tahun Anggaran

2020 menjadi 6,978 Triliun pada Tahun Anggaran 2021, meskipun kami di sini mengalami ini, pengurangan atau penurunan piutang, mengalami penurunan piutang jangka panjang dan penurunan aset lainnya, yaitu penurunan aset lainnya sebesar 9,1 Miliar.

Sedangkan, piutang jangka panjang sebesar 1,9 juta, ya, maaf 1,9 Miliar. Saya ulangi aset lainnya sebesar 9,1 Miliar itu dan piutang jangka panjang sebesar 1,9 Miliar. Kemudian, untuk laporan operasional di *slide* nomor 7, perlu kami sampaikan bahwa terjadi penambahan defisit dari 1,896 Triliun rupiah pada Tahun Anggaran 2020 menjadi 2,110 Triliun rupiah pada Tahun Anggaran 2021. Antara lain akibat dari penurunan penerimaan PNPB, penambahan belanja pegawai dan adanya penyusutan aset tetap. Bisa kita lihat pada tabel tersebut yaitu defisit sebesar 11,298% atau sebesar Rp214 Miliar sebagai defisit laporan operasional.

Berikutnya, pada *slide* nomor 9 kami laporkan perubahan ekuitas periode 31 Desember Tahun 2021 dan 2020, di sini ekuitas awal 1 Januari sebesar Rp6,6 Triliun diperoleh dari ekuitas akhir pada Tahun 2020. Kemudian, defisit laporan operasional diperoleh dari laporan operasional Tahun 2021 sebesar Rp2,1 Triliun, terjadi koreksi yang menambah ekuitas sebesar 1,6 Miliar kurang lebihnya, terdiri dari koreksi reklasifikasi aset dan koreksi nilai aset non-revaluasi. Kemudian, terjadi transaksi antar entitas sebesar 2,482 Triliun. Terdiri dari selisih realisasi pendapatan dan belanja, kemudian transfer keluar aset TNI Angkatan Udara dan pengesahan hibah dalam dan luar negeri.

Slide berikutnya *slide* nomor 11, izin berkat dukungan, dan bimbingan arahan dari Komisi V DPR RI maka penilaian opini BPK atas laporan keuangan BMKG Tahun Anggaran 2021, berhasil memperoleh penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah kami terima sebanyak tujuh kali berturut-turut. Terima kasih berkat arahan dan bimbingan dari Komisi V.

Berikutnya, izin kami melaporkan realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun ini, data *ter-update* hingga tanggal 20 Agustus. Perkembangan anggaran BMKG Tahun Anggaran 2022, kami mendapatkan Pagu awal sebesar Rp3,1 Triliun terdiri dari belanja pegawai sekitar 736 Miliar. Belanja barang sekitar Rp1,186 Triliun dan belanja modal sekitar Rp1,185 Triliun, namun mengalami *automatic adjustment* dua kali. Yang pertama sebesar 115,870 Miliar dan yang tahap kedua sebesar, mohon maaf 115, ya, betul 115,87 Miliar dan yang kedua sebesar 220,154 Miliar. Namun kami menerima revisi buka blokir sebesar 26 Miliar dan akhirnya Pagu kami setelah mengalami pengalihan sebesar, jadi setelah *automatic adjustment* dan buka blokir dan pengalihan anggaran sebesar 2,6 Miliar ke BRIN, karena 12 pegawai kami pindah ke BRIN, maka Pagu yang kami terima Pagu akhir adalah Rp3,106 Triliun.

Kemudian, izin di *slide* nomor 14, Realisasi Anggaran hingga 20 Agustus sebesar 400, mohon maaf, sebesar 40,11% yaitu belanja pegawai terealisasi sebesar 65,23%. Belanja barang 46,70% dan belanja modal 16,11%. Realisasi fisik mencapai 43,69%. *Slide* nomor 15, di sini terlihat bahwa sebagian besar yang terealisasi adalah rupiah murni, baik untuk belanja pegawai, belanja

barang, dan belanja modal. Namun, yang pinjaman luar negeri ini yang baru bisa terealisasi baru belanja barang. Belanja modal masih dalam proses dan untuk PNPB juga belanja barang yang baru dapat terealisasi secara optimal, belanja modal juga belum optimal.

Kemudian, perlu kami sampaikan penyebab realisasi rendah adanya kegiatan pinjaman luar negeri atau *loan* yang sudah dialokasikan tetapi masih dalam proses lelang belum kontrak. Beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut adalah tahapan lelang dalam proses pengadaan barang jasa yang bersumber dari *loan*, cukup lama mengikuti standar World Bank yang perlu banyak *step* mulai dari proses penyusunan spek khususnya dalam hal ini adalah proyek (suara kurang jelas).

Setiap proses tahapan yang banyak tadi dalam pengadaan barang dan jasa harus ada diterbitkan *no objection letter* atau nol oleh World Bank dan proses untuk mendapatkan nol ini, kami mengalami berminggu-minggu. Kemudian untuk proyek *loan* modernisasi maritim atau MMS 2 keberlangsungan tender pemilihan, tergantung persetujuan *lender*. Sekali lagi dalam bentuk *no objection letter* atau nol. Sedang penerbitan *no objection letter* tidak ada batas waktunya kapan meskipun sudah berbulan-bulan tetap *no objection letter* ini tidak dapat atau belum berhasil diterbitkan meskipun kami telah berupaya untuk mempersuasi agar nol ini segera diterbitkan.

Kalau tidak diterbitkan seluruh tahapan akan berhenti selama berbulan-bulan tidak ada progres, hal itulah yang saat ini terjadi. Kemudian, penyebab yang kedua adalah yang mengakibatkan penyerapan rendah kami masih dalam proses adaptasi dalam menggunakan aplikasi sakti dalam proses pengajuan sampai dengan pencairan. Jadi, prosesnya cukup lambat saat pengajuan sampai pencairan dana.

Kemudian yang ketiga penyebabnya adalah termin pembayaran belanja modal baru bisa dibayarkan setelah peralatan masuk ke Indonesia yaitu di triwulan kedua bahkan ketiga karena proses inden peralatan impor minimal tiga bulan. Jadi, sebelum alat sampai di Indonesia termin tidak dapat dicairkan. Jadi, kami nanti mohon arahan lanjut terkait kendala-kendala tersebut.

Kemudian, izin melanjutkan RKA K/L BMKG Tahun Anggaran 2023 dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023. Tema, masih sama dengan tahun lalu peningkatan, mohon izin, tema RKP Tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. BMKG dalam hal ini mendukung arah kebijakan dalam pembangunan rendah karbon transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim serta pembangunan Ibukota negara. Selain itu BMKG juga mendukung dalam prioritas nasional yang ke-6 yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Kita lanjut ke *slide* nomor 20, beberapa sasaran utama bidang meteorologi klimatologi geofisika dalam rancangan awal RKP Tahun 2023 yaitu meningkatkan kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat Tahun 2023, harus mencapai target 3,5 menit dari

sebelumnya 4 menit. Jadi, harus lebih cepat 30 detik. Kemudian, meningkatkan sistem dan respon peringatan dini yang didukung oleh upaya kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana, serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana, targetnya adalah 96% untuk persentase kelengkapan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologi dan tektonis dari 94% di tahun ini dan meningkatkan akurasi informasi meteorologi dan klimatologi dari 91%, mohon maaf dari 90, dari 82% akurasi informasi klimatologi menjadi 83%. Sementara akurasi informasi meteorologi adalah 91% yang kurang lebih sama dengan tahun lalu, namun kemarin terakhir kami evaluasi ternyata kami sudah mencapai sekitar 92% per Agustus ini.

Kemudian, perlu kami sampaikan arah kebijakan pembangunan BMKG dengan tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan renstra BMKG Tahun 2020-2024 yaitu mewujudkan BMKG berkelas dunia dengan spirit *socio-entrepreneur*. Kami mencanangkan sejak Tahun 2020 hingga saat ini adalah 5 isu strategis, 5 agenda utama yaitu kebutuhan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Kemudian organisasi yang efisien dan mampu beradaptasi, kemudian perlunya pemenuhan layanan informasi MKG sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian penguatan dan pengembangan infrastruktur peralatan operasional BMKG dan kebutuhan data yang terintegrasi untuk mendukung layanan informasi.

Nah, arah kebijakan tersebut adalah lima isu utama pengembangan SDM dan seterusnya hingga peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan dan inovasi yang tidak pernah berakhir. Termasuk juga mengoptimalkan *big data artificial intelligent implementation* untuk *smart intelligent information system 5.0* dan ini sangat penting, yang warnanya merah adalah pengadaan yang transparan, bersih, dan berkualitas. Untuk itu, sejak Tahun 2020, proses pengadaan kami terutama untuk kegiatan yang prioritas nasional dan kegiatan strategis kami dikawal oleh BPKP, LKPP, dan juga Kejaksaan Agung dan saat ini kami juga dikawal oleh Bareskrim dan dalam proses dikawal oleh KPK.

Slide berikutnya adalah BMKG *roadmap* untuk Tahun 2024, tadi sudah kami sampaikan. Untuk Tahun 2023 adalah mengoptimalkan *big data artificial intelligent* dan *smart intelligent information system*. Kemudian Pagu Anggaran BMKG kalau kita melihat Renstra memang selalu mengalami *backlock*, namun terima kasih berkat dukungan dari Komisi V DPR RI, *blacklock* yang kami alami ini trennya semakin menipis. *Insyah Allah* dalam waktu tidak lama lagi *backlock* ini akan semakin pudar.

Kemudian, rincian Pagu Anggaran BMKG Tahun 2023, ini kita lihat bahwa total anggaran kami Pagu Anggaran kami adalah Rp3,010 Triliun dengan alokasi untuk operasional sebesar Rp986 Miliar dan non-operasional sebesar Rp2,023 Triliun. Sumber pendanaan mayoritas dari rupiah murni sebesar Rp2,351 Triliun dan dari pinjaman luar negeri sebesar 389 Miliar serta dari SBSN sebesar 202,58 Miliar.

Kemudian dari *slide* berikutnya kita lihat tadi yang sudah disampaikan Pagu Anggaran mayoritas dari mohon maaf Pagu Anggaran mayoritas

dialokasikan untuk belanja barang sebesar 44,01%. Kemudian, belanja modal sebesar 934%, kemudian sumber pendanaan mayoritas dari rupiah murni sebesar 78,12%. Kami juga mohon izin perkenan persetujuan Bapak, Ibu, Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami muliakan bahwa berdasarkan rakornas BMKG di bulan April yang lalu, kami memutuskan adanya pergeseran anggaran sebesar 50 Miliar untuk kepentingan penguatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Jadi, untuk program pertama meteorologi klimatologi dan geofisika, ini kami mengurangi sebesar 50 M, namun kami alihkan ke dukungan manajemen kita tambahkan sebesar 50 M, untuk peningkatan kapasitas komponen SDM unggul di pusat pendidikan dan pelatihan di BMKG. *Nah* sehingga *exercise* kami untuk program yang pertama menjadi 1,644 Triliun dan program yang kedua bertambah menjadi 1,365 Triliun.

Kenapa kami harus, di *slide* berikutnya justifikasi kenapa harus mengalihkan tersebut, karena untuk mewujudkan akselerasi pengembangan SDM BMKG melalui program SDM unggul Tahun 2022 hingga 2026 yang terdiri dari pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan yaitu melalui *talent scouting*, kegiatan dukungan untuk mendapatkan beasiswa pihak ketiga, dan pembiayaan beasiswa BMKG, dan mohon izin dengan perkembangan kondisi cuaca dan iklim yang semakin kompleks dan rumit, kami memandang sangat penting bahwa ASN BMKG minimal 500 orang sebelum Tahun 2030 harus sudah sederajat atau bergelar doktor, sehingga ambisi kami saat ini doktornya belum ada 50 orang. Padahal persoalannya semakin rumit maka 450 orang harus segera belajar lebih gigih lagi, lebih maju lagi, terutama ke negara yang sudah maju agar BMKG mampu menjaga keselamatan masyarakat dengan analisis daya analitik yang lebih kuat.

Kemudian juga pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan yaitu pemenuhan 20 ASN, per tahun atau per pegawai. Kemudian pemenuhan komitmen internasional dan pembangunan *smart learning platform* serta persiapan sertifikasi personel MKG atau pembentukan asesor kompetensi.

Kemudian perbandingan Pagu Anggaran 2023 versus *exercise* akibat pengalihan tadi kita bisa melihat di sini yang terjadi perubahan adalah di pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia meningkat 50 M. Di *slide* berikutnya halaman 30, di sini kita lihat pengembangan dan pengelolaan UPT BMKG turun 50 M. Jadi, diambilkan dalam pengembangan dan pengelolaan UPT BMKG.

Slide berikutnya rincian prioritas nasional, di sini untuk prioritas nasional yang bersumber dari pinjaman luar negeri. Nilai terbesar adalah untuk di kegiatan nomor 8 adalah layanan informasi meteorologi maritim melalui *project strengthening of Marine Meteorology* sebesar 150 M. Kemudian, berikutnya di kegiatan nomor 2 adalah untuk pembelian peralatan monitoring gempa bumi dan tsunami melalui *Indonesian disaster resilience inisiative project* sebesar 76,77 M dan untuk pengembangan sistem *big data* dan *high performance computer* melalui *project* yang sama sebesar 60,6 Miliar. Serta untuk peralatan penguatan *strengthening climate and weather service capacity phase 2*,

sebesar 50 M dan layanan peringatan dini cuaca dan *scaling up weather capacity* sebesar 38,489 M.

Slide berikutnya untuk sumber dana rupiah murni di sini kami prioritaskan untuk terutama di sini kegiatan pemeliharaan operasional layanan informasi gempa bumi sebesar 99 M dan untuk sistem operasional informasi kualitas udara sebesar 26,6 M. Kemudian juga untuk peralatan seismograf informasi gempa bumi dan tsunami sebesar 22,826 M, layanan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang berkualitas sebesar 18,8 M. Kami alokasikan pula untuk sekolah lapang gempa bumi dan juga sekolah lapang, ya, sekolah lapang gempa bumi ini untuk Indonesia Timur, Tengah, dan Barat dan kami alokasikan yang terbesar adalah untuk Indonesia Timur. Menyusul tengah dan yang kemudian baru Indonesia Barat.

Kemudian juga adanya *project* layanan informasi meteorologi publik sebesar 50 M dan pemeliharaan operasional jaringan informasi dan komunikasi MKG sebesar 139 M, dan pemeliharaan operasional terutama MKG sebesar 200,7 M. Kemudian juga untuk sekolah lapang cuaca nelayan 3,4 , sekolah lapang, mohon maaf, ini sekolah lapang ini untuk nelayan juga dibagi tiga Timur, Tengah, Barat. Ini sekitar 66 M, sehingga total dari rupiah murni sebesar Rp1,088 triliun.

Nah, ini berikutnya adalah rencana program dan kegiatan pelaksanaan sekolah lapang dari *slide* nomor 35 ini, kami tunjukkan bahwa kami *push* agar jumlah pesertanya semakin meningkat dari tahun ke tahun harus kita tingkatkan dari grafik ini terlihat semakin meningkat. Kemudian juga sebarannya ini kita lihat ada 76 lokasi di *slide* berikutnya, ya, *slide* itu benar kemudian distribusi kegiatannya di *slide* berikutnya, ada ini untuk apa, deskripsi kegiatan sekolah lapang iklim ada 76 lokasi di 28 provinsi dan 29 UPT. Untuk sekolah lapang cuaca nelayan *slide* berikutnya, trennya juga semakin meningkat saat ini pesertanya mencapai 5 ribu lebih dari tahun sebelumnya hanya 4,7 ribu sebarannya.

Pada *slide* berikutnya dan juga rinciannya di 29 lokasi, *slide* berikutnya, berbagai provinsi di sini kami sampaikan juga ya saya rasa itu sekolah lapang gempa *slide* nomor 44, ini juga semakin kita tingkatkan jumlah anggaran ataupun pesertanya, distribusinya juga kami tunjukkan pada peta halaman 45 dan *list* kegiatannya pada tabel.

Jadi, demikian Ibu-Bapak Pimpinan dan Anggota komisi V DPR RI yang kami muliakan sebagai penutup kami menyampaikan bahwa beban, mohon maaf, realisasi penerimaan PNBPN dalam kurun waktu sampai Tahun 2021 mengalami kenaikan namun Tahun 2021 mulai Tahun 2021 mengalami penurunan, hal ini disebabkan penerimaan PNBPN, BMKG utamanya dari jasa navigasi penerbangan di mana pada masa pandemi Covid-19 frekuensinya penerbangan mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Kemudian, beban operasional BMKG Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan disebabkan karena bertambahnya jumlah beban pemeliharaan peralatan operasional yang terus kami tambah setiap tahun dan

beban daya serta jasa, serta beban pegawai. Kemudian, terjadi juga penambahan defisit dari Rp1,896 Triliun pada Tahun Anggaran 2020 menjadi Rp2,110 Triliun, di Tahun Anggaran 2021 antara lain akibat penurunan penerimaan PNB dan penambahan belanja pegawai serta adanya penyusutan aset tetap.

Kemudian, Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 20 Agustus tahun ini sebesar 40,11% dengan prognosis sampai 31 Desember *Insyah Allah* sebesar 90,84%. *Nah*, rendahnya serapan di bulan Agustus sehingga bulan Agustus ini, akibat terutama kontrak pengadaan barang dan jasa yang menggunakan *loan* dan pembayaran termin serta ada, adanya kegiatan, kegiatan-kegiatan yang tertunda.

Demikian, kami sampaikan mohon arahan bimbingan dari Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI yang kami muliakan mohon berkenan arahan, masukan, bimbingan, dan sarannya. Mohon maaf apabila masih ada hal yang kurang, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Makasih Bu, selanjutnya Bapak kepala BNPP silakan, Pak.

**KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BNPP)/
BASARNAS (Marsekal Madya TNI HENRI ALFIANDI, M.Han):**

Bismillahirrahmanirrahim.

**Yang terhormat Ketua Komisi V DPR RI selaku Pimpinan Rapat,
Yang saya hormati para wakil Ketua, para Anggota Komisi V DPR RI,
Yang saya hormati pula Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi,
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,
Serta hadirin yang berbahagia,**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya, dan
Salam kebajikan,*

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan ridho-Nya kita dapat mengikuti rapat ini dengan baik secara langsung maupun virtual. Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI atas kesempatan yang diberikan kepada Basarnas untuk menyampaikan penjelasan dalam rapat dengar pendapat kali ini.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V yang saya hormati,

Pada bagian pertama paparan ini kami akan menjelaskan tentang Laporan Keuangan Basarnas Tahun Anggaran 2021. Pagu Alokasi Anggaran Basarnas pada Tahun 2021 sebesar 2,26 Triliun. Pagu tersebut mengalami *refocusing* sebesar 398,14 Miliar, sehingga menjadi sebesar 1,8 Triliun dengan realisasi 1,8 Triliun untuk atau 96,45% yang terdiri dari program teknis mengalami pemotongan sebesar 320,37 Miliar, menjadi 1,08 Triliun dengan realisasi 1,06 Triliun atau 97,97%.

Program dukungan mengalami pemotongan sebesar 77,77 Miliar sehingga menjadi 781,79 Miliar, dengan realisasi sebesar 737,51 Miliar atau 94,34%. Laporan Keuangan Basarnas APBN Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 sebagaimana terlihat dalam *slide*. Laporan neraca Basarnas per 31 Desember 2021 menunjukkan nilai aset Basarnas sebesar 5,72 Triliun, sedangkan nilai ekuitas dan kewajiban masing-masing sebesar 1,09 Miliar dan 5,72 Triliun.

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 yang menunjukkan defisit sebesar 2,03 Triliun. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan dari ekuitas awal tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar 5,98 Triliun menjadi ekuitas akhir per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5,72 Triliun. Basarnas memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP sebanyak 11 kali berturut-turut sejak Tahun 2010. Demikian, penjelasan terkait Laporan Keuangan Basarnas APBN di Tahun 2021 ini. Selanjutnya kami lanjutkan pada tentang realisasi APBN di Tahun 2022.

Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V yang saya hormati,

Basarnas sampai dengan bulan Agustus Tahun 2022 sesuai dengan surat Menteri Keuangan RI Basarnas mendapatkan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2022 sebesar 1,96 Triliun. Pagu Alokasi Anggaran tersebut mengalami dua kali kebijakan *automatic adjustment* atau pemblokiran. Pemblokiran pertama sebesar 98,35 Miliar dan yang kedua sebesar 112,59 Miliar sehingga Pagu Basarnas menjadi sebesar 1,75 Triliun yang terdiri dari Program Teknis menjadi 898,16 Miliar. Program Dukungan Manajemen menjadi 858,06 Miliar.

Realisasi Anggaran Basarnas sampai dengan Agustus 2022 adalah sebesar 905,36 Miliar atau 46,02% dari Pagu awal tahun, awal atau 51,55% dari Pagu setelah pemblokiran. Sedangkan, realisasi per jenis belanja dapat dijelaskan dengan rinci sebagaimana terlihat dalam *slide*. Realisasi belanja pegawai sebesar 229,82 Miliar atau 56,4% dari Pagu awal atau 59,15% dari Pagu setelah pemblokiran.

Realisasi belanja barang sebesar 407,35 Miliar atau 37,24% dari Pagu awal atau 44,58% dari Pagu setelah pemblokiran. Realisasi belanja modal besar 198,18 Miliar atau 57,98% dari Pagu awal sebesar 59,05% atau Pagu

setelah pemblokiran. Sedangkan, realisasi anggaran Basarnas per kegiatan untuk program teknis adalah sebagaimana terlihat dalam *slide*. Realisasi pengelolaan sarana dan prasarana SAR adalah sebesar 253,90 Miliar atau 36,04% dari Pagu awal atau 41,15% dari Pagu setelah pemblokiran.

Kedua, realisasi pengelolaan diklat dan pembinaan tenaga SAR adalah sebesar 24,95 Miliar atau 35,85% dari Pagu awal atau 41,53% dari Pagu setelah pemblokiran. Realisasi pengelolaan operasi SAR adalah sebesar 25,97 Miliar atau 34,64% dari Pagu awal atau 48,48% dari Pagu setelah pemblokiran.

Keempat, Realisasi Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR sebesar 77,79 atau 58,53% dari Pagu awal dan atau 67,41% dari Pagu setelah pemblokiran. Realisasi pembinaan potensi SAR sebesar 16,8 Miliar atau 71,57% dari Pagu setelah pemblokiran. Realisasi pengelolaan kesiapsiagaan SAR sebesar 172 Miliar kalau sudah di dalam, dihitung melalui pemblokiran menjadi 48,01% realisasinya. Rincian Realisasi Anggaran Basarnas per kegiatan Tahun 2002 program dukungan dan manajemen ini adalah sebagaimana terlihat dalam *slide* nomor 7, realisasi penyusunan rencana program evaluasi pro pelaporan dan kerja sama sebesar 5,37%, ulangi, Miliar atau 32,72% dari Pagu awal atau 44,74% dari Pagu setelah pemblokiran.

Realisasi penyesuaian produk hukum organisasi tata laksana dan pengelolaan pegawai adalah sebesar 4,31 Miliar atau 23,24% dari Pagu awal atau 32,69% dari Pagu setelah pemblokiran. Nomor 9, realisasi pengelolaan administrasi keuangan perlengkapan kehumasan dan protokol sebesar 435,47 Miliar atau 55,33% dari Pagu awal atau 57,7% dari Pagu setelah pemblokiran. Realisasi pengelolaan sarana dan prasarana aparatur adalah sebesar 30,64 Miliar atau 58,93% dari Pagu awal atau 63,71% dari Pagu setelah pemblokiran.

11, realisasi pengelolaan data dan sistem informasi adalah sebesar 12,38 Miliar atau 53,45% dari Pagu awal atau 55,02 setelah pemblokiran. Realisasi pengawasan dan pembinaan internal adalah sebesar 3,03 Miliar atau 50,05% dari Pagu awal atau 66,4% dari Pagu setelah pemblokiran.

Bapak Ketua, para wakil Ketua, dan para Anggota komisi V yang saya hormati,

Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, Basarnas telah melaksanakan operasi SAR sebagaimana terlihat dalam *slide* pada Tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus, Basarnas telah melaksanakan 1.323 operasi SAR, yang meliputi 4 operasi SAR terhadap kecelakaan pesawat udara, 492 operasi SAR terhadap kecelakaan kapal, 57 operasi SAR terhadap bencana, 720 operasi SAR terhadap kondisi membahayakan manusia, 50 operasi SAR terhadap kecelakaan penanganan khusus, beberapa operasi SAR menonjol yang dilaksanakan oleh Basarnas sampai dengan Tahun 2022 antara lain kecelakaan helikopter, *papa kilo delta alfa romeo*, pada tanggal Juni 2022 di distrik Jilato, Timika.

Kecelakaan Susi Air, *papa kilo bravo viktor mike*, Juni 2022 di distrik Duma, kecelakaan pesawat, *tango-tango 5009* malam hari bulan Juli 2022 di

Blora. Kecelakaan KM Ladang Pertiwi 02, pada Mei 2022 di Sulawesi Selatan. kecelakaan KM Cahaya Arafah, Juli 2022 di Halmahera Selatan. Sedangkan pemenuhan sarana dan prasarana SAR pada Tahun 2022 antara lain penyelesaian pengadaan kapal *rescue boat* kelas 1, *rigid buoyancy boat*, *rubber boat*, *rescue car*, *rescue truck*, peralatan *high and rescue*, peralatan *underwater rescue evacuation*, peralatan korban SAR dan peralatan pendeteksi korban reruntuhan.

Adapun rincian sepenuhnya sarana dan prasarana tersebut sebagaimana terlihat di dalam *slide*. Untuk kegiatan pelatihan potensi SAR, Basarnas telah melaksanakan pelatihan potensi SAR kepada 2.057 orang di seluruh wilayah Indonesia dengan rincian sebagaimana terlihat pada *slide*. Selain, melaksanakan pelatihan potensi SAR, Basarnas juga melaksanakan latihan SAR di dalam dan luar negeri.

Rincian latihan SAR tersebut sebagaimana terlihat dalam *slide*, pada Tahun 2022, Basarnas memperoleh penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN antara lain untuk kategori implementasi manajemen ASN terbaik, penetapan pemanfaatan data sistem informasi dan CAT, implementasi penerapan manajemen kinerja, penilaian kompetensi, perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian.

Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V yang saya hormati,

Pada bagian akhir akan kami jelaskan tentang Rencana Kegiatan Anggaran Basarnas Tahun 2023. Berdasarkan surat edaran bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri PPN kepada kepala Bappenas Pagu Anggaran Basarnas Tahun Anggaran 2023 adalah 1,88 Triliun dengan rincian sebagai berikut. Program teknis adalah sebesar 892,02 Miliar, program dukungan manajemen sebesar 860,02 Miliar, dan tambahan anggaran sebesar 135,79 Miliar, namun berdasarkan Pagu Kebutuhan Basarnas Tahun Anggaran 2023 sebesar 3,62 Triliun maka terdapat *backlog* sebesar 1,73 Triliun dengan rincian sebagai berikut. Program teknis sebesar 1,58 Triliun, program dukungan manajemen sebesar 154,45 Miliar. Rencana kegiatan dan anggaran Basarnas di Tahun 2023, per program sebagaimana dalam beberapa kegiatan bisa dapat dilihat di *slide*.

Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana SAR dengan anggaran 723,25 Miliar, pengelolaan diklat dan pembinaan tenaga SAR dengan anggaran 63,91 Miliar, operasi SAR dengan anggaran 83,57, pengelolaan sistem komunikasi SAR 85,42 Miliar, pengelolaan potensi SAR sebesar 39,0 Miliar, kesiapsiagaan SAR 32,58 Miliar, perencanaan kerja sama anggaran sebesar 12,13 Miliar, pengelolaan hukum, ortala dan kepegawaian sebesar 16,16 Miliar. Pelaksanaan pembayaran gaji operasional perkantoran, rumah tangga, keuangan, dan tata usaha humas protokol sebesar 782,9 Miliar. Pembangunan sarana prasarana aparatur dengan anggaran sebesar 25,17 Miliar, pengelolaan pusat data dan informasi, sebesar 18 Miliar, pengawasan internal dengan anggaran sebesar 5,08 Miliar.

Dalam Pagu Anggaran tersebut Basarnas menyusun rencana kerja mendukung RKP Tahun Anggaran 2023 terkait dengan kegiatan prioritas keselamatan dan keamanan transportasi. Kegiatan *project* prioritas nasional Basarnas yaitu yang pertama pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi SAR. Yang kedua yaitu pembinaan dan pendidikan sumber daya manusia keselamatan, keamanan, transportasi pencarian dan pertolongan. Dalam RPJMN Tahun 2020 hingga 2024, Basarnas ditargetkan memenuhi beberapa prioritas nasional sebagaimana terlihat di dalam *slide*, namun pada Tahun 2023, target yang diusulkan masih belum terpenuhi karena keterbatasan anggaran.

Target kegiatan prioritas nasional tersebut berupa pengadaan peralatan SAR, penyediaan sarana SAR laut, sarana SAR darat, dan pengoperasian operasi SAR, pengelolaan sistem komunikasi pengembangan sumber daya manusia, pemeliharaan sarana dan prasarana SAR, pemeliharaan peralatan sistem komunikasi, pemeliharaan peralatan teknologi informasi dalam surat Basarnas Pagu Anggaran Alokasi Anggaran untuk prioritas nasional sebesar 747,34 Miliar, nilai tersebut belum termasuk tambahan anggaran sebesar 135,7 Miliar. Perbandingan rincian target kegiatan prioritas nasional Basarnas sesuai surat bersama Pagu Anggaran dengan usulan Pagu Anggaran sebesar pada Tahun 2023 sebagaimana terlihat di dalam *slide*. Tambahan anggaran tersebut digunakan antara lain untuk rupiah murni pendamping atau RPM, pinjaman luar negeri PLN, pengadaan peralatan SAR, penyediaan sarana laut, sarana SAR darat dan pengadaan sarana SAR sebagaimana terlihat di dalam *slide*. Pada Tahun Anggaran 2023, Basarnas juga mempunyai target melaksanakan pembinaan potensi SAR kepada 5.000 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V yang saya hormati,

Demikianlah penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2021, realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pimpinan dan seluruh Anggota komisi V DPR RI, kepada Basarnas selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua, amin.

Sekian.

Om shanti shanti shanti om.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah penyampaian dari Pak Menteri Desa PDT, Kepala BMKG, Kepala BNPP, baik Tahun Anggaran 2021, proses perjalanan 2022, dan program Tahun 2023.

Sekarang sampailah saatnya kita sudah pendalaman Anggota sesuai dengan data yang kita miliki di sini, maka yang pertama adalah Pak Sudewo silakan, Pak Dewo.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

**Pimpinan yang saya hormati, kawan-kawan Anggota Komisi V yang saya banggakan,
Mitra kerja yang sekarang ini hadir yang saya hormati,**

Pertama, saya ingin kepada Menteri Desa, Menteri Desa itu anggarannya sangat sedikit, hanya sekitar 3 Triliun tapi program yang direncanakan sangat banyak sekali. Saya *nggak* membayangkan bagaimana kerja kerasnya Menteri Desa dengan seluruh jajarannya membuat satu program dan kegiatan sekian banyaknya itu pasti mengurus tenaga, mengurus energi, gitu. Sampai tidak kebayang mana yang harus diprioritaskan, yang pertama saya ingin mendapatkan satu penjelasan dari Menteri Desa, ini terkait dengan aspirasi atau keluhan masyarakat desa dan keluhan para Kepala Desa di seluruh Indonesia. Ada Perpres 104 Tahun 2021 yang haruskan bahwa, dana desa itu minimal 40% harus dipakai untuk BLT, kemudian kurang lebih 18% untuk ketahanan pangan.

Sebenarnya ini sudah dirubah oleh Presiden pada saat Presiden bertatap muka dengan para kepala desa, tetapi bagaimana legalitasnya apakah sudah ada surat resmi terhadap perubahan itu sehingga penggunaan dana desa tidak mengacu lagi pada Perpres 104/ 2021. Ini sangat ditunggu oleh para kepala desa, sangat ditunggu oleh masyarakat desa, mengingat dana desa itu menurut pengamatan mereka dan menurut pengamatan kami akan lebih tepat apabila digunakan untuk prioritas pembangunan infrastruktur karena pembangunan infrastruktur desa ini merupakan satu sektor yang vital untuk mendongkrak pertumbuhan perkembangan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bukan uang yang harus dibagi-bagi secara langsung kepada pribadi-pribadi, itu dampaknya sangat tidak mengena dan justru itu menjadi inefisiensi, tidak efektivitasnya penggunaan anggaran. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari Menteri Desa.

Yang kedua, dari anggaran yang digunakan atau dikelola oleh Menteri Desa sebesar kurang lebih 3 Triliun, ini mayoritas adalah berupa dana desa. Dana desa untuk mendukung penggunaan dana desa yang sebesar 64 Triliun, itu Kementerian Desa mendapatkan amanah kurang lebih sekitar 2 Triliun untuk mengawal penggunaan dana desa. Andai kata Menteri Desa itu fokus

terhadap Bagaimana penggunaan dana desa itu, artinya dikawal secara betul supaya uang 64 Triliun yang direncanakan di Tahun 2023 dan juga di Tahun 2022 ini, digunakan secara efektif, apakah betul desa menggunakan dana desa itu betul-betul tepat sasaran, betul-betul dalam perencanaannya itu sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan oleh desa atau tidak? Apakah betul-betul terjadi sesuatu ketaatan administrasi dan ketaatan dalam pertanggungjawabannya atautah tidak? Itu semua dicermati dan dievaluasi untuk di tahun-tahun yang mendatang.

Saya kira dari sisi ini, Kementerian Desa sudah bisa dikatakan berhasil dalam kinerjanya, tetapi kalau menyusun program yang sekian banyak sampai ada program yang mungkin *overlap* dengan kementerian-kementerian yang lain atau *overlap* dengan lembaga-lembaga yang lain yang harus dipaksakan dengan anggaran yang kecil-kecil dalam satu program atau kegiatan dengan anggaran 1 sekian Miliar, 2 Miliar, 4 Miliar tetapi menjadi tidak fokus, tidak kelihatan manfaatnya terhadap masyarakat, tidak kelihatan manfaatnya terhadap desa tertinggal atau transmigrasi, tidak ada ukuran yang jelas apa yang sudah dicapai oleh Kementerian Desa, jadi lebih baik program-program yang kecil sedemikian banyak itu diprioritaskan dalam satu kegiatan tertentu.

Oleh itu, Pimpinan, kami itu ingin berbicara, saya dan, ingin berbicara dengan Menteri Desa dalam rangka membantu Menteri Desa supaya lebih mengerucut pada satu program tertentu itu yang dikatakan prioritas, saya mengusulkan, saya mengusulkan, sebelum kami melakukan pendalaman terlalu panjang dan memberikan pendalaman dengan BMKG dan Basarnas saya mengusulkan supaya rapat ini di *break* sementara waktu kita berdiskusi dengan Menteri Desa, ya, diskusinya dari hati ke hati secara rasional dan realistis sehingga kita tidak terlalu panjang berdebat di sini untuk apa ? untuk melahirkan sebuah program yang sifatnya prioritas di Tahun 2023. Usulan saya di *break* sementara waktu, kita bicara dengan Menteri Desa di tempat lain, ya, dalam kali ini, barangkali itu yang saya usulkan supaya nanti akan lebih efektif dalam rapat kali ini, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Dewo, sebelum kita lanjut saya inikan di sini hanya memimpin rapat, Pimpinan rapat itu hanya memfasilitasi arus pembicara. Oleh karena itu, ini keinginan Pak Dewo, maka saya kembalikan kepada Anggota yang terhormat. Apakah setuju kita break 15 menit atau kita lanjut? Setuju, ya?

Tentu dengan mohon kesabaran Pak, Bu, apa, Bu kepala BMKG dengan BNPP barangkali kita *break* 15 menit Pak Menteri. Di mana tempatnya? Oh di ruang makan, silakan, Pak ya, kita *break* selama 15 menit.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 11.45 WIB)
(SKORS DICABUT PUKUL 12.00 WIB)**

Tidak boleh kurang tidak boleh lebih 15 menit ya, silakan Pak cuma 13 menit, karena sudah ada pembicaraan di internal yang sifatnya prioritas telah disepakati, maka pertanyaan di PDT transmigrasi sudah tidak ada lagi kan? cukup ya. Jadi, selanjutnya kalau begitu langsung saja kita sampaikan kepada Ibu BMKG silakan, Bu.

Eh, belum ada yang bertanya *sorry, sorry, sorry, sorry, sorry* mohon maaf. Maksud saya kami persilakan untuk mempertanyakan kepada Ibu BMKG maupun kepada Basarnas, kemudian yang berikutnya Pak Sudewo tadi sudah, maka sekarang adalah Pak Syahrul Aidi, Pak Syahrul Aidi silakan, Pak.

F-PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.):

Terima kasih Pimpinan, mohon maaf bukan menyalahi kesepakatan hanya saja pada kesempatan ini, di luar konteks yang tadi dibicarakan di internal, Pak Menteri Desa, tadi disampaikan salah satu target kita itu kan kemiskinan ekstrem dan dukungan Kementerian Desa untuk mensukseskan target ini adalah melalui BLT.

Nah, saya dengar BLT Dana Desa itu tetap dilanjutkan 2023 tetapi fokus pada kemiskinan ekstrem. Saya ingin mendengarkan Pak Menteri, apa kriteria dari kemiskinan ekstrem. Saya sangat mendukung program ini, Pak Menteri, karena memang ternyata fakta, bahwasanya masyarakat ketika dibagikan PKH, tidak seluruh warga miskin itu bisa terakomodir, sangat-sangat membantu BLT dana desa yang pernah kita komunikasikan, sehingga masyarakat yang miskin di desa itu bisa terayomi dan terangkum semuanya.

Nah, untuk program 2023, Pak Menteri tadi menyampaikan ada BLT tetap dana desa tetapi untuk kemiskinan ekstrem. Kalau boleh saya memberikan pandangan, kebetulan saya pernah dulu bekerja sebagai Ketua Badan Amil Zakat dan turun ke lapangan. *Nah*, yang saya temui Pak Menteri mudah-mudahan sama persepsinya bahwa kemiskinan ekstrem yang saya pahami itu dalam bahasa agama Islamnya adalah *fuqara*. *Fuqara* itu adalah orang miskin yang tak mampu bekerja, orang miskin yang tak mampu bekerja itu dia miskin cacat, miskin sakit menahun artinya itu sakit kronis. Mungkin dia kencing manis, mungkin dia stroke, mungkin dia lumpuh, mungkin dia kanker, tumor dan ini banyak terjadi di daerah kita.

Kemudian ada miskin tua renta, miskin tua renta kemudian yang keempat adalah miskin anak-anak. Mudah-mudahan sama persepsinya nih nanti bahwasanya orang-orang miskin yang empat kategori yang saya sampaikan ini, mereka ini adalah miskin yang tak mampu lagi bekerja. *Nah*, artinya memang secara permanen mereka ini miskin kecuali yang anak-anak tadi yang memang kalau sudah besar bisa mereka bekerja tapi yang tiga tadi saya melihat program pemerintah untuk mereka ini belum saya temukan.

PKH biasanya disyaratkan anak ada yang sekolah, jadi untuk miskin cacat misalnya kita tidak punya program yang konkrit untuk itu. *Nah*, mudah-mudahan diarahkan ke sana tetapi saya ingin mendengarkan dulu seperti apa BLT dana desa ini untuk kemiskinan ekstrem. Terima kasih, Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Jawabannya sekaligus Pak, langsung saja yang BMKG dengan dengan BNPP kalau ada pertanyaan. BNPP juga tidak ada.

F-PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Basarnas ada

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Kemarin saya melihat ada teknologi Pak, kalau sekarang untuk udara itu kan ada apa namanya dengan *drone*, ya. Sekarang ada teknologi *drone* laut mudah-mudahan nanti bisa untuk percepatan kita penyelamatan bagi warga yang tenggelam segala macam mudah-mudahan bisa *upgrade* itu nanti Basarnas dengan teknologi tersebut. Jadi, teknologi *drone*-nya *drone* laut, menggunakan. Jadi, tidak harus dengan orang yang ke lautnya ke tengah lautnya, terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Syahrul. Berikutnya, Pak Muhammad Aras.

F-PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan,
Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi beserta seluruh jajaran,
Ibu Kepala BMKG beserta seluruh jajaran,
Kepala BNPP beserta seluruh jajaran, dan
Seluruh hadirin yang sangat berbahagia,**

Pertama-tama tentu kami mengapresiasi atas Hasil Pemeriksaan BPK yang menempatkan ketiga mitra kita pada hari ini untuk mendapatkan WTP. Tentu ini pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan oleh mitra kami, mitra kita untuk memperlihatkan integritas dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.

Yang kedua adalah tentu capaian-capaian yang sampai hari ini dua lembaga Kementerian dan Basarnas sudah pada trek yang sudah hampir mencapai target. BMKG yang sedikit masih terseok-seok perlu mungkin

strategi-strategi khusus untuk BMKG agar capaiannya bisa, pada akhirnya mencapai target yang telah direncanakan sejak awal.

Kemudian, untuk Kemendes ini hampir 2 Triliun dana yang digunakan untuk kepentingan pengawasan terkait dengan dana desa. Oleh karenanya, tentu kami berharap bahwa pemanfaatan dana ini betul-betul untuk meningkatkan kualitas SDM, sehingga kami tidak mau lihat lagi besok-besok ada aparatur desa, ada kepala desa yang tentu terjerat oleh APH, apa (Aparat Penegak Hukum) terkait dengan pelaksanaan tugasnya, karena kita harapkan bahwa dana yang sebesar ini bisa betul-betul dimanfaatkan untuk membekali SDM dari para aparat desa dan termasuk dalamnya Kepala Desa untuk bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

Kami tentu sangat prihatin melihat bahwa banyak kepala desa yang hari ini dilantik tetapi bukan berarti bahwa mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kita tahu bahwa mereka-mereka terpilih bukan karena mereka pintar membuat laporan, mereka pintar membuat perencanaan, tetapi mereka tokoh, mereka dipilih oleh masyarakat. Sehingga, tidak semua kepala desa yang terpilih adalah otomatis mampu untuk melakukan tugasnya sehari-hari, oleh karenanya perlu pembinaan dan pelatihan. Terutama dari Kementerian Desa yang melalui pendamping desa dan seterusnya agar mereka betul-betul bisa melaksanakan pembangunan di tingkat desa dan melaksanakan amanah dari Kementerian Desa untuk bisa mensejahterakan seluruh masyarakatnya.

Yang kedua, terkait dengan Perpres 104, ini betul-betul harus di apa namanya, dikaji ulang agar pemanfaatannya di tingkat desa betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Bukan cuma Anggota DPR, bukan cuma Bupati yang punya rencana kerja janji-janji ke masyarakat. Kepala Desa hari ini juga sebelum mereka pilih mereka punya janji-janji kepada masyarakat. *Nah*, kalau selama 5 tahun ini tidak bisa melaksanakan janjinya berarti mereka akan gagal melaksanakan visi-misi dalam pembangunan desa oleh karenanya Perpres 104 ini, salah satu penyebab sehingga mereka juga tidak bisa merealisasikan program-program yang telah direncanakan sejak awal.

Kemudian, untuk BMKG di masa reses kemarin dan dua minggu lalu, kami melakukan bersama-sama dengan teman-teman BMKG dengan melaksanakan sekolah lapang, baik sekolah penerbangan maupun cuaca nelayan. Ini ternyata memang sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak *stakeholder* terkait. Terutama misalnya sekolah lapang cuaca nelayan, ini perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, ya. Kenapa? Karena ini betul-betul dibutuhkan oleh para nelayan kita untuk bisa mencari nafkah di laut sana. Ya, terutama para nelayan yang tradisional Bu, kalau yang sudah profesional ya saya pikir untuk meng-*update* teknologi yang ada di BMKG cukup mudah tapi yang tradisional ini perlu perhatian khusus ya, karena mereka-mereka ini masih sangat tergolong yang bawa di bawah garis kemiskinan. Hampir rata-rata nelayan-nelayan kita terutama nelayan tradisional ini sebagai lokus untuk penanganan kemiskinan sehingga kalau programnya misalnya BMKG juga menysasar ke sana paling minimal bahwa mereka bisa tertangani lebih cepat.

Kemudian yang berikutnya adalah kami melaksanakan SLCN kemarin di kota Parepare ternyata di sana tidak ada kantor BMKG, Bu. Jadi, permintaan mereka di sana bagaimana ini dibuatkan kantor di sana karena juga di sana di samping di daerah sekitar juga daerah nelayan banyak terutama juga pelabuhan yang cukup besar di sana ada pelabuhan Parepare yang cukup besar yang melayani Indonesia timur, juga ada di sampingnya di Karongkong di daerah Barru juga cukup besar dan ini perlu informasi cuaca yang lebih cepat, lebih detail, dan lebih akurat.

Untuk Basarnas, ini juga sama Sulawesi Selatan menjadi daerah yang sangat rawan gempa, rawan bencana, oleh karenanya tentu harus memperluas daerah jangkauannya. Jadi, daerah Barru Parepare juga ternyata Basarnas tidak ada di sana ya mudah-mudahan bisa ditambah kantor perwakilan di sana supaya ini daerah-daerah laut Sulawesi yang cukup ganas bahkan kemarin pesawat Adam Air itu pertama kali ditemukan puingnya di Kabupaten Barru, Pak KaBasarnas. Oleh karenanya, tentu kekuatan-kekuatan tim dari Basarnas juga harus diperkuat, terutama kualitas SDM agar bisa cepat mengantisipasi seluruh kegiatan-kegiatan Basarnas yang tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat yang mendapatkan bencana.

Barangkali begitu yang saya sampaikan Pak Ketua, terima kasih atas kesempatannya.

*Wabilahi taufik walhidayah wallahul muwaffiq lla aqwamith-thariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Makasih Pak Aras. Berikutnya, Ibu Sadarestuwati.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua,

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati dan seluruh mitra Komisi V,

Saya langsung saja, berkaitan dengan Kementerian Desa, saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak, siapa? Tadi PKS tadi, Pak Syahrul, mana Pak Syahrul tadi sudah hilang ya. Pak Syahrul tadi ya, berkaitan dengan kemiskinan ekstrem dan juga sampai sekarang di apa anggaran Kementerian Desa masih ada bahwasanya dana desa untuk dialokasikan ke penanganan apa BLT ya untuk BLT.

Pak Menteri, beberapa desa mungkin tidak beberapa, banyak desa seperti halnya di Jawa di mana jumlah, jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan, ini seperti apa yang disampaikan oleh para Kepala Desa di tempat kita bahwasanya mereka sangat kesulitan ketika harus mengalokasikan BLT kembali. Karena apa, hampir semuanya sudah mendapatkan bantuan lebih dari satu bantuan lebih dari satu jenis bantuan. Menurut saya, apa tidak sebaiknya dana desa itu benar-benar dikembalikan lagi difokuskan kembali untuk membangun infrastruktur desa yang memang saat ini masih sangat dibutuhkan. Seperti halnya di Dapil saya masih banyak yang namanya jalan usaha tani yang belum ada. Ini tujuannya adalah salah satunya untuk meningkatkan nilai tukar petani. Bagaimana supaya petani kita juga bisa mendapatkan keuntungan karena adanya infrastruktur yang memadai, yang bisa dijangkau ke tempat-tempat produksi mereka dengan begitu bisa mengurangi biaya apa, transportasinya, dengan begitu juga akan meningkatkan pendapatan atau hasil dari petani itu sendiri.

Ini contoh saja, sehingga saya secara pribadi, saya berharap juga ada teman-teman nanti yang bisa sepemikiran dengan saya bahwasanya dana desa bisa dikembalikan lagi untuk fokus pada pembangunan infrastruktur desa. Untuk, mungkin masih ada PR berkaitan dengan perubahan dana eks-PNPM Mandiri ke Bumdesma. Ini nanti tentunya saya *nggak* tahu kapan untuk bisa diberikan, kami diberikan pencerahan kembali dan *update* sejauh mana dari apa pelaksanaan hasil dari rapat yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Mohon maaf ini keluar dari konteks rapat kita hari ini.

Kemudian untuk BMKG, untuk BMKG Ibu, melihat apa namanya serapan anggaran dari BMKG di halaman 15 ada realisasi untuk keuangan dan fisik 40% dan 43%. Kalau melihat dari realisasi ini, ini mas ya, iya cukup berimbanglah. Akan tetapi, ketika saya melihat di belakang tadi yang disampaikan oleh Ibu, berkaitan dengan adanya kegiatan dari pinjaman luar negeri yang sudah dialokasikan tetapi masih dalam proses lelang atau belum kontrak. Sehingga, saya yakini bahwa dalam penyampaian Ibu tadi, itu akan bisa menjadi salah satu apa namanya penghambat dari serapan anggaran di BMKG.

Bahkan tadi, Ibu menyampaikan ada beberapa hal yang menyebabkan lambatnya dari proses ini. Tadi disampaikan tahapan lelang yang masih banyak *step*-nya, kemudian setiap proses tahapan dan pengadaan harus ada 0 dan lain-lainnya. Yang ingin saya tanyakan apa memang sudah harus seperti ini atau adakah jalan lain strategi yang bisa menerobos dari apa yang tadi Ibu sampaikan. Sehingga, bisa mempercepat proses yang kalau saya bilang ini formalitasnya gitu, karena saya yakin apabila ada, apa alasan-alasan dan cara penyampaian kita untuk apa, kepada apa namanya, si pemberi dari pinjaman luar negeri ini tentu dengan, apa ya, strategi komunikasi yang baik saya kira ini bisa diterobos karena kalau tidak bisa jadi, anggaran ini nanti tidak terserap lagi.

Apalagi namanya pinjaman luar negeri pasti nanti ada, ya, beban yang harus kita tanggung. Jadi, saya harapkan ada nanti Ibu bisa menyampaikan strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk bisa mempercepat ini.

Kemudian, yang kedua Ibu berkaitan dengan alokasi anggaran. Ibu menginginkan ini digunakan untuk pengembangan SDM BMKG, saya ingin tahu juga seberapa pentingnya untuk pengembangan sumber daya manusia BMKG ini, sehingga perlu dilakukan saat ini juga dengan merealokasi kegiatan yang sudah ada.

Kemudian, juga tentunya melakukan realokasi anggaran ini harusnya juga dilakukan rapat di ruangan ini, tapi mungkin saya waktu itu tidak hadir atau bagaimana mungkin yang ingin saya tanyakan apakah sudah pernah disampaikan di dalam ruang rapat ini.

Kemudian, juga dana untuk apa di sini, untuk pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan pemenuhan 20, JP itu apa Bu? Oh, jam pelajaran per tahun. pemenuhan komitmen internasional, iya. Saya ingin tahu Ibu yang yang yang apa artinya sebegitu pentingnya untuk segera dipenuhi. Kemudian juga saya ingin tahu komitmen internasional ini yang dimaksudkan itu yang seperti apa dan seberapa sejauh apa komitmennya itu?

Karena Ibu, kalau melihat dana yang mau dialokasi ini adalah menurut saya ini sangat penting karena salah satunya adalah kantor, rehabilitasi, rehab untuk kantor karena saya tahu sendiri, Bu. Mohon maaf sekali melihat kantor BMKG di sini itu dengan megahnya luar biasa gedungnya tetapi di daerah-daerah mohon maaf, ya Allah, *melas* banget. Kalau kantornya Kementerian Desa di daerah bagus, kalau kantornya Basarnas sudah bagus-bagus, kantornya BMKG, ya Allah, ada yang nempel begitu saja Ibu. Jadi saya kira ini juga perlu Ibu pikirkan lagi agar teman-teman yang bekerja juga merasa lebih nyaman dan lebih apa, tenang dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Karena tugas BMKG ini mereka di daerah hampir 24 jam kan Bu, Mereka terus melakukan pengamatan.

Kemudian untuk Basarnas, untuk saya *ngomong* apa ya kalau Basarnas ini, sudah anggaran kecil tiap hari ada kecelakaan ya, hanya ini saja Pak, saya minta ada evaluasi. Evaluasi dan inventarisasi peralatan Bapak yang mohon maaf anggaran kecil nanti kalau tidak diperhatikan betul apalagi tidak ada *maintenance* untuk kapal-kapal *panjenengan* yang mestinya bisa bergerak cepat karena tidak ada anggaran ya, jadi terlambat dalam mengevakuasi korban ataupun memberikan pertolongan.

Kami mohon ada, ya, inventarisasi dan evaluasi untuk seluruh peralatan yang ada karena waktu di Surabaya Bapak, saya bilang saya ingin menyeberang ke pulau apa itu yang, bukan, bukan, yang Gresik nyeberangnya dari Gresik, Bawean. Ibu *nggak* berani ini kalau sudah ombaknya di atas 1,5. Kalau tidak membawa Ibu *nggak* apa-apa kalau membawa Ibu bahaya. Saya juga *nggak* mau bahaya Pak, jadi saya mau yang aman, Pak. Jadi, saya *cancel* *nggak* jadi ke Pulau Bawean karena kapalnya tidak aman. Maka dari itu di Surabaya, tolong juga diperhatikan untuk diberikan apa, kapal yang lebih baik ya, yang tentunya juga apa ya benar-benar bisa digunakan sebagaimana mestinya ya, saya itu susah kalau *ngomong* mau *ngomong* itu kasihan juga anggarannya kalau orang Jombang bilang *sak dumil ning* tugasnya banyak banget, gitu.

Saya kira itu juga satu hal lagi, jangan mengorbankan teman-teman yang ada di lapangan. Beri mereka apa namanya sebuah proteksi sehingga mereka bisa bekerja dengan tenang.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih Bu Estu, berikutnya Pak Ilham Pangestu siap-siap Pak Hamka BKD.

F-P. GOLKAR (ILHAM PANGESTU):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat Basarnas, Badan Meteorologi, dan Kemendes,

Saya menyoroti Kemendes karena teman-teman sudah menjelaskan semua melihat Pagu Anggaran 2022 Kemendes mendapat alokasi dana 3 Triliun. Sementara Pagu Anggaran 2023, 2,9 Triliun, artinya 119 juta selisih pada Anggaran Tahun 2022 dan 2023. Permasalahan sekarang di lapangan masih banyak daerah transmigrasi yang masih belum tersentuh secara, apakah pernah dibantu? Pernah dibantu, kita akui Kementerian Desa Transmigrasi membantu untuk desa-desa yang bertanggung jawab daerah yang dikirim ke transmigrasi, tapi sampai sekarang belum signifikan, belum sesuai dengan semangat dari tujuan awal untuk membantu daerah transmigrasi.

Saya melihat anggaran dari Tahun 2023, anggaran transmigrasi itu sekitar 258 juta sementara Pagu 2022, 313 juta, artinya dari Pagu keseluruhan dari Kementerian Desa hanya 8% yang dialokasikan untuk transmigrasi. Saya berpendapat dan berharap transmigrasi mendapat anggaran yang bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di Tahun 2023 minimal 20% dari Pagu Anggaran Kementerian Desa.

Ini mohon jadi catatan dari temen-temen karena masih banyak UPT bina kawasan di transmigrasi di Indonesia, masih ada 152 kawasan dan 94 UPT yang masih bertanggung jawab, jadi tanggung jawab pusat. Mungkin ini Sekretariat, coba nanti jadi catatan ini menambah Pagu Anggaran untuk transmigrasi dari kementerian anggaran Pagunya ditingkatkan sekarang 8% bisa minta ditingkatkan.

Itu saja Pak Menteri dan Basarnas seperti teman-teman bilang tadi anggarannya sangat minim yang terpenting seluruh keluarga besar Komisi V mendukung seluruh kerja Basarnas dan mengapresiasi selama ini dan begitu juga Badan Meteorologi, kita juga mendukung selamat bekerja mudah-

mudahan, minta bantu teman-teman saya yang di Banggar untuk bisa menambah anggarannya. Mungkin itu saja Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Makasih, Pak Ilham. Pak Hamka B Kady.

F- P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Baik,

Bismillahirohmanirohim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri PDT,
Ibu Kepala BMKG,
Pak Kepala Badan SAR Nasional,**

Saya tidak masuk dulu pada persoalan Tahun Anggaran 2023, hanya saya fokus pada pertanggungjawaban Pak Ketua, namun beberapa hal karena jangka waktu yang harus diserahkan kepada Badan Anggaran laporan pertanggungjawaban ini 26 Agustus, berakhir. Waktu kita hanya 3 hari.

Nah, oleh karena itu saya menganggap bahwa tidak ada juga masalah di dalam laporan pertanggungjawaban itu karena sudah selesai dilaksanakan dan bahkan sebenarnya kalau *toh* terjadi hal-hal yang mungkin berbeda karena laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan ini sudah ada sebenarnya Pak, ya.

Nanti akan kita sampaikan nanti pada tanggal 26 dalam Rapat Paripurna. Jadi, secara keseluruhan sebenarnya Menteri Keuangan kemarin udah menyampaikan secara *totally* laporan pertanggungjawabannya sehingga apa yang kita bahas laporan pertanggungjawaban hari ini saya kira hanya menambah apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Beliau.

Saya menganggap bahwa laporan pertanggungjawaban itu akan diundangkan dalam bentuk apa namanya undang-undang, makanya harus segera masuk pada tanggal 26, ya. Sebenarnya konsep laporan undang-undangnya sudah ada, ya. Jadi, saya kira dari ketiga lembaga ini Menteri PDT dan apa namanya Ibu Kepala BMKG dan Basarnas, saya kira tidak ada masalah, ya, tidak ada tambahan yang signifikan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan itu karena sudah Wajar Tanpa Pengecualian dan ini secara keseluruhan juga draf undang-undangnya sebenarnya sudah ada. Saya hanya mengecek nanti angka-angkanya yang Bapak laporkan pada

hari ini, maka laporan pertanggungjawaban Tahun 2021 ini akan diundangkan pada waktu yang akan datang.

Nah, kedua, beberapa catatan mengenai anggaran ya tadi *alhamdulillah*, Basarnas jadi dari mitra kerja kita hanya dua lembaga yang bertambah anggarannya. Menteri PDT dan BMKG juga tidak bertambah, malah berkurang sedikit Menteri PDT ya, Pak ya. Hanya Basarnas bertambah menjadi 135 tambahan, sedangkan PUPR *insya Allah* besok nanti kita bahas menjadi 100 dari 98 menjadi 125 Triliun. Yang paling besar adalah anggaran ke PUPR terkait juga posisi dan anggaran yang akan dialokasikan ke IKN.

Saya kira komentar saya hanya itu, catatan saya saja kepada Ibu BMKG mengenai pergeseran tadi Bu, kami belum bisa dulu bahas secara detail dan pelajari dulu semua persoalan-persoalan Anggaran Tahun 2023 yang akan datang kita akan bahas secara detail nanti. Saya hanya menerima pertanggungjawaban ini dengan baik karena kita juga tahu bahwa semua sudah Wajar Tanpa Pengecualian.

Saya kira itu saja Pimpinan, terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Sekarang sudah menunjukkan jam 12 lewat 30 menit, sementara kita jam 4 juga akan ada acara dengan Pak Menteri Perhubungan. Ada dua pertanyaan saya, apakah kita ishoma dulu? Lanjut? Lanjut? Baik.

F- P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

Interupsi sedikit Pimpinan. untuk menghemat waktu sekiranya kita fokus dulu kepada pertanggungjawaban kalau tidak ada hal-hal yang prinsip, karena yang Tahun 2023 masih ada pembicaraan selanjutnya mengenai anggaran teknisnya, tapi kalau ada tidak ada masalah juga. Hanya itu saya sampaikan makasih.

KETUA RAPAT:

Saya kira sudah dengarkan kita lanjut. Yang kedua, ada pertanyaan saya kita kan jam 4 itu ada rapat dengan Menhub. Apakah karena jam 4 kan pendek sekali waktunya dengan *anu*, dengan maghrib apa kita geser jam 7 malam? Tapi jam 4 sore itu *nggak* sampai 2 jam, pas selesai membacakan *anu*-nya apa. Break maghrib ya? Kita sepakat ya.

F- P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Interupsi, sedikit Pimpinan, bukan persoalan waktunya, ini karena kami sebenarnya belum bisa membahas detail yang 2023. Itu hanya gambaran umum dulu, oleh Menteri. Tidak memerlukan waktu lama, karena kalau kita mau komentar atukah menganalisis Tahun 2023 tentu secara detail. Di sisi lain baru kami terima pokok-pokok atau anggarannya untuk Tahun 2023. Saya menyarankan fokus kepada pertanggungjawaban dulu, ya, nanti yang Tahun 2023 akan ada pembicaraan secara teknis, makasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya dengarkan masukan teman-teman Anggota ya. Tadi ada saran dari Pak Hamka untuk didengarkan dan kalau misalnya bisa kata Pak Hamka, kita prioritaskan dulu membahas laporan pertanggungjawaban 2022. Baik, sesuai keinginan Anggota bahwa kita lanjut saja yaitu sekarang Pak Tamanuri silakan, Pak.

F-P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Paling setengah jam ajalah, *nggak* usah banyak-banyak. Saya ini taat dengan apa kesepakatan, jadi sesuai kesepakatan, kita *nggak* ngomong lagi saya *nggak* mau ngomong sama Menteri Desa udah cukup, itu ya harusnya begitu. Karena kita kesepakatan tadi, sekarang saya mau ngomong sama Ibu, Ibu Kepala BMKG.

Bu, saya barusan *ngebuka* acara sekolah lapang meteorologi, luar biasa di hotel bintang 5. Hebat sekali itu, betul di Novotel, saya sendiri *ngomong waduh*. Kalau macam gini sekolah lapang saya juga mau ini masuk, sekolah lapang sebetulnya kita di lapang-lapangan ajalah *nggak* usah di hotel yang begitu tinggi. Dananya banyak Bu, yang dikeluarkan dan itu tidak menyangkut masyarakat. Ini hanya diambilkan dari petugas-petugas kita yang ada, di bandara-bandara dan juga di dari angkatan-angkatan baik polisi maupun tentara. *Nah*, ini harapan saya adalah walaupun dia meteorologi, coba kita sisipkan juga masyarakat-masyarakat di situ, supaya ilmu ini bisa berkembang. Jangan hanya kalau kawan-kawan yang ini kan memang sudah dididik sebagai ASN jadi sudah setidaknya-tidaknya sudah mengetahui secara global.

Kalau rakyat kita itu kan, kalau terjadi apa-apa juga mesti melibatkan rakyat. Ini perlunya kan kita harapkan, usulan kita itu adanya bank sekolah lapang segala macam untuk membantu masyarakat kita yang kena covid dua tahun *nggak* bisa makan, karena duit *nggak* ada, bantu dengan ini. Ada dananya sedikit-sedikit, uang lelah, uang apa uang transportasi, *nah*, saya kritik juga ini. Yang sekarang mau saya resmikan juga di Lampung Timur. Masa itu uang ongkos orang 85.000 Bu *gimana*? Orang dari mana-mana dari jauh-jauh ya kalau naik mobil aja sudah habis duit itu. Sampai di situ hanya 85.000 bayangkan. Coba dinaikkan seperti upah orang satu hari 125.000 lah, atau di atas 100 lah walaupun tidak sampai 125, ini 85.000.

Jadi, ini keterpaksaan aja orang-orang karena *nggak* enak sama kita karena kita yang carikan orang-orangnya sehingga mereka mau. Jadi, ini tolong diadakan perbaikan-perbaikan di kemudian hari. Kemudian, kita tidak mengharapkan honor 100.000 - 150.000 kita datang ke Jakarta ini meresmikan itu, tidak. Tapi, ada penghargaan kalau saya waktu jadi Bupati apapun yang hadir itu pasti dapat honor. Jadi, kalau kita ini datang ke situ saya 2 juta pulang pergi, Jakarta-Lampung untuk meresmikan seperti itu. Kalau saya ada honorinya 100.000 kan lain Bu, saya (suara kurang jelas) ada penghargaan. Cuman itu aja, jadi tolong itu dipikirkan hal serupa itu.

Kemudian yang tadinya saya selalu bertanya-tanya. Kenapa ada keterlambatan terus mengenai pembangunan apa, yang didanai oleh *loan*, rupanya baru terjawab sekarang bahwa dari luar negerinya terlambat. Lega hati saya jadi saya *nggak* marah-marah lagi, makasih Bu.

Saya lanjutkan kepada Bapak kepala Basarnas. Ini semakin ekstrem, desa ekstrem, angin ekstrem, segala macam. Jadi, orang yang mati juga nanti ekstrem. *Nah*, ini tugas Bapak *nih* ngurusin yang *enggak* enakunya. Kalau yang enakunya diurus orang lain, Pak. Pak Letnan Jenderal ini ngurus yang *enggak* enakunya kalau terjadi hal-hal yang tidak enak Bapak yang ngurus. Kalau kapal tenggelam Bapak ngurus, jangan lagi kita, di Itali yang barusan dalam tv itu. Kapal pesiar begitu besar, bagus, tenggelam. Jadi, *nggak* bisa jadi ukuran lagi itu. Akan tetapi kita sebagai manusia dan petugas yang ada Indonesia ini selalu waspada. Kita kuatkan sumber daya manusia kita, bikin tangguh. Bikin tangguhnya kayak mana ini sampai sekarang saya belum lihat ini di usulan Bapak ini yang dulu yang di Jonggol itu yang tempat berenang itu hanya berapa meter itu, kenapa *nggak* diusul-usulin ini jadikan sekian ratus meter. Untuk latihan, masa mau latihan ke Merak situ, dekat Ancol situ ya, ini Bapak sudah bikin kolam ya besarin dong, perpanjang dong. Orang-orang Australia aja numpang latihan di tempat Bapak *ngeliat*, waduh.

Disangka tadinya gagah-gagah, *ngeliat* badan Bapak-Bapak besar-besar hebat-hebat, begitu di tempat latihan kayak gitu. *Nah*, ini, ini harus tangguh Pak, harus tangguh. Didukung juga oleh peralatan, jangan kita punya kapal yang bobot Bapak itu yang panjang 60 meter, sudah 11 tahun *nggak* ganti-ganti jangan, Pak. Jadi, tetap setidaknya lima tahun sekali diadakan renovasi-renovasi. Sebabnya kita harus ngejar, kalau orang di Amerika tadi, Selat Sunda di tengah-tengah Selat Sunda itu dekat Gunung Krakatau akan kita kejar dari Bakauheni atau dari Merak, *nah*, ini memerlukan kecepatan yang tinggi supaya untuk keselamatan. Oleh karena itu, harapan saya adalah kalau Bapak punya ini ada tempat-tempat pendidikannya harus ditingkatkan Pak, harus ditingkatkan.

Sebab dia, kalau sumber daya manusia Bapak *nggak* tangguh ilmu dan fisiknya, ya mohon maaf kita terpaksa kayak dulu itu. Kita harus berenang lagi mencari yang apa itu yang kapal terbang yang nyungsep di Pulau Seribu itu. Kita *nggak* mau seperti itu. Saya rasa demikian Pak Ketua, cukup terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Tamanuri. Berikutnya Pak M. Fauzi, siap-siap Cen Sui Lan.

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Iya, makasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan rapat, teman-teman Komisi V, Pak Menteri Desa Tertinggal kemudian Kepala Badan BMKG dan Basarnas, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati,

Ada beberapa hal yang ingin saya minta perdalam, Pak ya, jadi karena itu saya singkat-singkat saja, Pak. Yang pertama saya konsisten juga seperti apa disampaikan Pak Tamanuri saya *nggak* bertanya untuk, Pak Desa Tertinggal ini, karena yang saya tanya sudah terjawab tadi, walaupun kurang ini, Pak. Itu Bu Novi ini, Pak, pesan Bu Novi ini, Pak, saya sampaikan.

Yang pertama, untuk BMKG tadi disampaikan bahwasanya untuk 2023 ini, tidak ada perubahan tema, ya. Kalau menurut saya dengan tidak ada perubahan tema ini, terkesan ini tidak ada progres Bu, karena juga tidak dijelaskan kenapa temanya tetap sama dengan Tahun 2022, *nah*, karena itu saya ingin minta penjelasan kira-kira di 2022 ini apa yang sudah terealisasi mana yang belum. Sesuai dengan hubungannya dengan tema itu tadi, itu yang pertama.

Yang kedua, saya juga ingin mengetahui, Bu, kira-kira sistem informasi publik yang mempunyai terobosan baru, Bu, ya terhadap mempublikasikannya kerja-kerja Ibu itu kira sudah 2023 ini sudah sudah sudah ada belum gitu Bu, karena kalau biasa-biasa saja kadang-kadang masyarakat lihatnya juga nih dari *Google* juga bisa dilihat gitu Bu. Jadi, harus ada yang beda karena anggarannya untuk informasi ini juga sangat luar biasa Bu. Walaupun anggaran keseluruhan di tempat Ibu sangat memperhatikan.

Kemudian yang ketiga, tadi Ibu menjelaskan bahwasanya penyerapan agak terlambat ini, karena ada hubungannya dengan hutang luar negeri yang hutang itu untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang kegiatan itu merupakan satu rangkaian dengan kegiatan yang dibiayai oleh APBN. Ada *flow chart*-nya gitu-gitu ya Bu, ya. Yang saya ingin tanyakan Bu, kalau seandainya ternyata karena tadi Ibu juga katakan di apa proses lelang ini tidak ada batas waktunya sementara penyerapan APBN itu ada batas waktunya kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Walaupun tadi Ibu *menanya* apa, menyampaikan minta arahan, *Nah*, usulan Ibu kira-kira apa gitu, Bu.

Kemudian, saya juga ingin mengetahui Ibu, tadi PNBP Ibu turun gitu katanya ya, saya ingin mengetahui Bu, dengan kenaikan tiket apa ada

pengaruh nanti dengan PNBPN Ibu, gitu ya. Kemudian, maksudnya PNBPN yang dia dapat, ada, ada, penambahan atau tidak gitu Bu, karena tiket naik loh sekarang Bu gitu.

Kemudian, ini tadi saya juga ingin menyinggung apa yang disampaikan Pak Tamanuri, Bu, bahwasanya sekolah gempa itu sangat penting, Bu, ya. Cuma sayang Bu, khusus di Dapil saya Bu, dua kali pelaksanaan di dua Kabupaten yang berbeda, saya melihat terlalu banyak anggota Ibu di bawah intervensi Bu. Misalkan siapa yang ikut dalam pelatihan itu, itu anggota Ibu semuanya yang menentukan Bu. Padahal kita ini semuanya dalam rangka menambah elektoral kami di Dapil. Kita saya, Ibu jatuhnya cuma 13 Bu dari jumlah peserta, Bu. Kemarin saya mengadakan di Palopo, Bu, akhirnya saya *nggak* datang, Bu.

Bayangkan gitu Bu, jadi sebenarnya elektoral ini belum tidak, belum kita rasakan sudah kecil partisipasinya, memang kita memahami anggarannya juga tidak baik, tapi ruang itu juga akhirnya kita tidak bisa maksimalkan karena terlalu banyak orang-orang Ibu yang menentukan si A si B. Sementara sebenarnya kita mengharapkan ruang kita di situ lebih maksimal. Tolonglah Ibu koordinasi sama Ibu punya anggota juga. Termasuk yang pertama di Luwu utara juga begitu juga, Bu. Sudah segmentasinya terbatas orangnya itu, apa, masyarakat umum sedikit sekali.

Nah, kalau pun memang mau seperti itu oke *nggak* masalah tetapi orangnya beri porsi kamilah. Jangan semuanya diambil oleh Ibu punya Anggota dibawah buat apa kalau gitu Bu, untuk elektoral kami, walaupun pasti ada dampaknya positifnya untuk masyarakat tetapi juga bagaimana kepentingan Ibu berjalan, kami juga bisa ada di situ, gitu Bu. Dua kali sekolah di tempat di Dapil saya Bu, itu intervensi Anggota Ibu saya simpulkan terlalu banyak gitu. Saya minta tolong itu untuk dikoordinasikan gitu.

Kemudian pengalihan anggaran Bu, *nah*, pengalihan anggaran saya setuju dengan saya tadi sebenarnya ini harus kalau memang ini belum dilakukan harusnya dibicarakan dulu di DPR, Bu, karena fungsi kami kan salah satunya fungsi *budgeting*, Bu. Sementara Ibu setahu saya, seingat saya *nggak* tahu Pimpinan atau teman-teman yang lain seingat saya belum ada persetujuan itu ya, itu Ibu sepihak saja.

Sebenarnya kalau kami juga mau menolak itu bisa-bisa saja Bu. Ini bicara-bicara masalah tertib, Bu. Ketertiban kita dalam menjalankan aturan main gitu, jangan kami ini dibelakangkan sementara itu bagian yang Ibu lakukan bagian dari fungsi kami juga ada di situ. *Nah*, sehingga kami tidak ketinggalan, bagaimana kalau suatu saat kita ditanya oleh banyak orang tapi kita tidak tahu, gitu.

Kalau masalah keberuntukannya pasti Ibu lebih pahamlah dibanding kami, tapi prosesnya, Bu. Sesuatu yang benar Bu, kalau dilakukan dengan cara yang salah bisa salah, Bu. Jadi, itu tolong dicamkan, Bu.

Kemudian untuk Basarnas ada satu saja Pak, ya. Di sini ada selisih sekitar 2 Triliun ya, antara Pagu Kebutuhan Basarnas dengan Pagu Indikatif Tahun 2022 Bu *eh* Pak. *Nah*, kurang lebih sekitar 2 Triliun mengingat postur anggaran yang masih terpangkas cukup besar pada Tahun 2022, apa kiranya strategi yang akan diterapkan Basarnas gitu, Pak, mengingat ada selisih itu, saya pikir itu Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Bu Cen Sui Lan, siap-siap Pak Syafiuddin.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan, teman-teman, dan mitra kerja Komisi V,

Saya langsung saja Pimpinan, sesuai dengan kesepakatan dan komando dari Pimpinan saya tidak menanyakan kepada Pak Menteri. Udah selesai Pak Menteri ya, saya ke Bu Kepala. Saya melihat ini ya Bu ya, penyebab.

KETUA RAPAT:

Kepala apa? Ibu Kepala apa?

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Ketua, Kepala BMKG-lah, Ketua. Bu Kepala, saya melihat ini ada penyebab realisasi rendah untuk pinjaman luar negeri, ini kalau tidak salah kan tahun lalu sudah kita bahas. Berarti Ibu sebenarnya sudah mengetahui teknisnya, jadi tentunya perluantisipasi sehingga ini tidak terjadi karena di dalam *loan* ini juga ada perangkat, *eh* radar dari MMS-2 untuk Kepri. Jadi, tolong kalau sudah ada kan seharusnya sudah ditindaklanjuti, bisa ditindaklanjuti tanpa ada hal-hal begini. *Nah*, apakah bisa dapat kita itu yang harus saya tegaskan karena ini udah dua tahun ini saya minta-minta. Jadi tolong Bu Kepala pastikan lagi.

Juga mengenai ada yang saya minta kan untuk Dapil saya. Kita ketahui Dapil saya itu kan kalau Anambas sama dengan Natuna itu pulau terluar. Jadi saya minta Bu Kepala, teropong hilal tolong bisa diberikan untuk di sana karena itu daerah terluar. Itu sangat diperlukan sekali. Untuk yang BMKG sepertinya itu saja saya tidak meminta yang lain tapi yang saya minta tolong diakomodir.

Untuk Pak Jenderal, Basarnas terima kasih saya setiap ke Dapil selalu dikawal, selalu ditemani didampingi sama stafnya luar biasa, luar biasa sekali.

Jadi, terima kasih Pak Jenderal. Pak Jenderal saya hanya minta, saya hanya minta mungkin penambahan personil untuk Anambas dan Natuna, karena kita tahu itu daerah terluar di pulau terluar jadi memang perlu diskresi dan perlu prioritas. Jadi, Pak Jenderal tolong ya itu aja dari saya yang lain-lain tidak terima kasih Pimpinan.

Terima kasih semua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Cen. Pak Syafiuddin. Siap-siap, Pak Irmadi Lubis.

F-PKB (H. SYAFI UDDIN, S.Sos.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati saudara Menteri Desa, saudara Kepala BMKG dan Basarnas dan rekan-rekan Anggota komisi V yang saya banggakan,

Pertama kepada BaPak Menteri Desa, cuman sedikit ada aspirasi dan ini sudah menjadi aspirasi kuat dari teman-teman asosiasi kepala desa terkait dengan masa jabatan kepala desa yang diusulkan dari 3 periode menjadi 2 periode namun dengan jabatan 9 tahun. Tentunya ini adalah aspirasi yang menurut saya bagus karena memang pemerintah desa ini adalah ujung tombak dalam pembangunan di Indonesia ini. Dan, yang kedua dengan pertimbangan bahwa jabatan yang 3 periode artinya ada pemilihan kepala desa tiga kali di dalam periode itu, itu tentunya juga tidak bagus karena ada konflik-konflik yang tidak sama seperti pemilihan Bupati, pemilihan legislatif karena sangat besar sekali konfliknya. Karena masa jabatan 6 tahun ini kadang-kadang perseteruan antara calon kepala desa terpilih dan kepala desa yang kalah ini masih belum selesai.

Setelah itu baru ada pemilihan kepala desa lagi nanti, nanti kalau seumpama sembilan tahun maka ini juga tentunya ini adalah mengawal program-program dari pemerintah pusat yang dialirkan ke pemerintahan desa ini sangat bagus. Jadi saya berharap Kementerian Desa tidak hanya mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri namun tentunya tetap *monitoring* dan mengawal bagaimana usulan ini, ini menjadi sebuah kesepakatan di pemerintah pusat.

Yang kedua, kami apresiasi terhadap Kementerian Desa, karena di Realisasi Anggaran 2022 ini per Agustus 2022 ini, ini sangat bagus kalau dibandingkan dengan Realisasi Anggaran di Tahun 2021 kemarin. Ini saya pribadi apresiasi, terus kepada Ibu BMKG, mohon maaf kepada Bapak Tamanuri dan teman yang tadi yang satunya siapa lupa, ya. Kalau di Madura Bu, kita apresiasi artinya tapi yang timbul pertanyaan kenapa *ndak* sama ya? Kalau saya pribadi sebagai Anggota DPR RI Dapil Madura dua kali diberikan apa namanya, diberikan untuk membuka sekolah cuaca lapangan lapang

cuaca ini, ini sangat bagus sekali. Dan, menurut saya tidak terlalu *high class* karena kalau di Bangkalan itu ditempatkan di apa namanya di gedung yang tidak begitu mewah namun yang saya apresiasi ini tidak sama dengan Pak Tamanuri Kalau Pak Tamanuri ongkosnya cuman 85.000 kita dapat 150.000 gitu.

Tidak sama ya Bu, ini pertanyaannya *kok ndak* sama ini kan harus harus dirapikan anak buah Ibu. Bagi kami juga terkait dengan Anggota yang hadir kalau yang di Madura dan Sumenep, yang Bangkalan dan Sumenep 100% dipasrahkan kepada kita untuk diberikan keleluasan mendatangkan orang untuk sekolah lapang cuaca itu. Jadi, sekali lagi saya apresiasi Bu, karena apa uang 150.000 sehari itu bagi orang Madura terutama di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep yang kebetulan adalah salah satu dua dari kabupaten miskin ekstrem di Jawa Timur. Kalau kita kategorikan miskin ekstrem itu katanya menurut data BPS, itu pendapatannya dibawah Rp500.000. Maka dari itu seandainya sekolah ini sampai satu bulan lebih bagus lagi Bu, jadi bisa mendapatkan 4.500.000. Maka tidak ekstrem lagi nanti di Madura ini.

Jadi, itu ya jadi saya apresiasi anak buah Ibu kalau di Madura ini tolong kalau perlu dikasih apa namanya *privilage* atau apalah jadi bagus-bagus banget kalau di Madura. Terus, tapi ada beberapa laporan Bu ya kalau tadi apresiasi ada laporan dan mudah-mudahan ini tidak benar. Tentunya kami sebagai Anggota komisi V ingin BMKG ini bagus dan tidak tercoreng citranya, laporan bagi saya pribadi ini lewat WA dan juga lewat telepon namun tidak bisa saya verifikasi kebenarannya dan mudah-mudahan ini bohong.

Ada beberapa *tender* yang dilakukan di BMKG ini terutama anggaran yang dari pinjaman luar negeri itu. Itu menurut laporan yang saya terima ini kurang *fair* karena ada sistem monopoli pihak ketiga yang selalu menang di situ. Saya berharap bahwa BMKG laporan ini tidak benar. Karena apa menyangkut anggaran dari pinjaman luar negeri ini sangat harus hati-hati Bu ekstra berhati-hati. Jadi, mudah-mudahan ini laporan ini tidak benar dan saya berharap BMKG terus berinovasi karena BMKG ini bagi saya seperti tukang pawang gitu artinya tukang ramal, mudah-mudahan ramalannya selalu tepat dan selalu jelas sehingga musibah-musibah yang terjadi di Indonesia ini bisa terukur untuk kita antisipasi, ini untuk yang BMKG.

Untuk Basarnas lagi-lagi mohon di dalam perencanaan ini, Pak. Ini kan ada *backlog* terus ya mulai dari 2022-2023 dan sekarang paling besar dari Anggaran Pagu Indikatif yang diajukan ya, oleh Basarnas sampai ada *backlog* 3,5 Triliun ini kan kita juga sangat menyayangkan. Apakah di sistem perencanaan yang dilakukan oleh teman-teman Basarnas ini Menteri Keuangan melihat asal-asalan atau *gimana* namun saya berharap seperti yang disampaikan teman-teman yang lain walaupun di anggaran ini sama. Walaupun ada pengurangan sedikit 100 sekian miliar mudah-mudahan ini menjadi sebuah apa namanya potensi anggaran yang bisa menjadi antisipasi terhadap bagaimana teman-teman di Basarnas ini menanggulangi musibah-musibah yang terjadi di Indonesia ini.

Terus harapan kami Pak, harapan kami mungkin di Basarnas ini karena tentunya teman-teman juga berharap kita ini ada *outcome* politik *gituloh*, manfaat politik dari anggaran-anggaran dari mitra ini mungkin ada *split* anggaran untuk bagaimana seperti meniru BMKG. Kalau di BMKG ada sekolah lapang cuaca nelayan, mungkin di Basarnas ada sekolah apa *gituloh*. Yang penting kita bisa mengikutsertakan apa namanya masyarakat di Dapil kami untuk ikut sekolah itu dan yang paling penting lagi selain dapat ilmu dapat uang Rp150.000 itu, Pak. Jadi, membantu bagaimana mengurangi miskin ekstrem yang ada di Madura, mungkin seperti itu kurang lebihnya saya mohon maaf.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamithaaryq.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Syafiuddin. Pak Irmadi Lubis belum ada, ya? Pak Eddy Santana silakan, Pak.

F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Terima kasih

**Pimpinan yang saya hormati beserta seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Menteri Desa, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas beserta seluruh jajaran yang saya hormati,**

Jadi, saya harus juga menyampaikan Pak Menteri Desa, ya, bahwa jangan sampai ada konotasi yang jelek, yang tadi dibicarakan adalah bagaimana program yang sifatnya untuk memajukan desa yaitu infrastruktur desa dan juga ekonomi desa gitu, peningkatan ekonomi desa, antara lain jalan-jalan desa dan desa wisata, seperti contoh saya membawa program desa wisata walaupun cuman satu di Musi Banyuasin *wah* itu dampaknya besar sekali bagi kami. Terima kasih, Pak, itu Pak. Inilah yang kita inginkan tadi kalau bisa diperbanyak itu, jadi desa wisata kemudian juga kalau bisa jalan-jalan desa itu diperbanyak, kalau saya baca di Dapil saya ada itu jalan primer desa gitu sebesar 400 an.

Desa wisata juga ada satu 500, inilah yang dibicarakan tadi kalau bisa dlebihkan dan disetujui oleh Pak Menteri ya. Kita akan cari jalanlah untuk melaksanakan dengan anggaran yang ada itu di atas. Ini jadi saya pikir ini bagus Pak Menteri lebih fokus jadi hasilnya lebih kelihatan *gitu*. Hasilnya lebih kelihatan nanti dan kami juga ada kebanggaan dari desa itu juga. *Wah* ini yang bawanya Pak Eddy Santana ini dengan Menteri Desa. Jadi Menteri Desa yang dapat nama dan kami juga mendapat nama di desa itu.

Inilah yang mungkin menjadi daya tarik juga suara kami akan lebih bagus di situ. Itu Pak, jadi *nggak* ada yang macam-macam. Kemudian kalau BMKG gini, Bu, saya membuka sekolah lapang cuaca ya, nelayan ya, sudah berapa kali dua kali kemarin lewat zoom. *Alhamdulillah* jadi sekarang ini

nelayan kami itu sudah, sudah lebih tahu gitu, sudah kita informasikan juga sudah kita informasikan bahwa sekarang ini nelayan itu bukan mencari ikan. Kalau mencari ikan bisa dapat bisa *nggak*, tapi menangkap ikan, nelayan itu menangkap ikan karena sudah tahu koordinatnya di mana dengan aplikasi yang Ibu ajarkan gitu kan, beserta jajaran. Ini saya kira kemajuan yang luar biasa dan juga tahu ada bahaya *nggak* di situ gitu, ada ombak tinggi dia lewat mana gitu. Kalau dulu kan tradisional gitu ataupun konvensional sekali. Bahkan saya sampaikan kalau dulu lihat istrinya, istrinya, dia bangun, istrinya tidur ke kiri dia arahnya ke barat gitu. Kalau istrinya tidur ke kanan dia ke arah timur. *Nah*, kalau istrinya telentang ya *nggak* usah melaut gitu kan, di rumah aja gitu. Iya di rumah aja. Itu bilanganya begitu tapi sekarang luar biasa.

Nah, terbalik Bu dengan Pak Tamanuri, di tempat saya itu. Coba sekali-sekali kami dibawa ke Palembanglah ya tolong jangan di sungsang terus gitu. Di tempat-tempat panas coba kami sekali-sekali di hotel gitu kan. Tempat dingin, nelayan Bu, kepengen juga merasakan itu. Kalau sehari dua hari saya kira *ndak* ada masalah lah. Sehari atau dua hari, ini coba dipikirkan juga. Mungkin bukan bintang 5 tapi ya bintang 3 apa ya, sesuai dengan anggarannya Ibu, dan honorinya juga perlu dipikirkan itu. Kalau bisa diperjuangkan ditambah gitu kan.

Ini jadi *ndak* apa-apa Bu, menurut saya di hotel tapi kalau anggarannya memang ada tidak berlebih-lebihan cuma dua hari bukannya sebulan nginep di hotelnya. Sebulan kan banyak ini, ini. Ini di tempat saya, jadi terima kasih Bu. Jadi, sekolah lapang cuaca nelayan itu sudah sangat membantu sekarang nelayan sudah memakai aplikasi itu di *gadget*-nya di handphonenya masing-masing sebelum berangkat, makasih.

Nah, untuk satu lagi tapi ada tadi yang Ibu sampaikan, Bu, itu *nggak* ada aturannya Bu ya, pengawalan. Ini juga harusnya menyampaikan bahwa kita ada antisipasi anti korupsi dan sebagainya dengan pakta integritas, penandatanganan pakta integritas dan sebagainya. Kerjasamanya dengan KPK, bisa dengan Kejaksaan ataupun dengan Kepolisian. Bukan pengawalan dalam arti negatif, saya kira belum diatur itu *nggak* ada aturan.

Nah, untuk Basarnas kalau saya lihat itu *trend* yang paling banyak kecelakaan *tuh* di laut, artinya kita konsentrasi sudah tahu nih, untuk pembelian peralatan atau segala macam itu ya untuk yang di sana yang lebih besar presentasinya. Kecelakaan udara cuma dua atau empat gitu itu pun sangat kecil dia di, di Papua ya tapi di laut sering. Termasuk nelayan, nelayan yang kita latih itu juga rawan terhadap bahaya-bahaya seperti ini ya. Kalau cuaca jelek bisa tenggelam dan ini tugas Basarnas yang dicari ya. Tugas yang mulia, saya beberapa kali kunjungan juga dengan teman-teman melihat kalau di Labuan Bajo ada kapal apa tuh Pak, ya bagus ya tapi tempat lain belum ada itu. Hal seperti ini juga belum lengkaplah. Kita inginkan setiap ya ke depan ini setiap provinsi itu ada gitu ya, setiap provinsi yang punya laut gitu ya di sana. Kalau di gunung beda lagi kan.

Ini saja mungkin Pak Ketua, Pimpinan, ya. Semoga masukan ini bisa berguna bermanfaat, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Makasih Pak Eddy, Ibu Novita Wijayanti. Ini kadangkala ini Anggota Komisi V kurang adil. Saya minta di apa namanya, kita ishoma dulu *nggak* mau, padahal kasihan saya cuma sendiri, di sini kasihan. Sudah tiga jam ini belum selesai.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Kasihan mitra juga pasti lapar ini, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Mitra juga kasihan lapar nih. *Nggak* apa-apa, tinggal Ibu Novita terakhir sekarang ini.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Silakan, Bu.

F-P GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Saya *nggak* lama Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Anggota yang saya hormati fisik maupun virtual, kemudian mitra semuanya yang saya hormati.

Langsung aja Pak Menteri, tadi terima kasih sudah ada pembicaraan *gimana* kita membahas anggaran untuk Indonesia lebih baik lagi. Kemudian pastinya tadi ada sedikit aja tentang apa jembatan, drainase, kemudian jalan desa, irigasi, embung, Bumdes, dan lain sebagainya yang mungkin nanti bisa di *follow up* oleh jajaran dari Pak Menteri Desa. Kemudian, pastinya jajaran ini juga sinergi untuk kepentingan di desa. Satu poin Pak Menteri tentang kemiskinan ekstrem, saya berharap sekali bahwa *update-update* data itu harus cepat gitu, Pak. *Update* data untuk miskin ekstrim yang ada di desa-desa itu.

Ini kan Kementerian Desa bersinergi dengan Bappenas kemudian PU dan beberapa menteri lainnya. Kementerian Sosial juga pastinya dengan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang mengalami di desa-

desa. Jadi, masukkan saya poin terpenting adalah bantuan tersebut bagus turun ke masyarakat tetapi *update* data ini yang harus terus dilakukan. Jangan sampai datanya itu lama sehingga yang harusnya menerima itu tidak menerima. Kemudian, yang seharusnya tidak menerima, dia menerima terus.

Kemudian BMKG, Ibu, dan jajaran pastinya saya terima kasih karena sudah acaraan di Cilacap, sudah beberapa kali dan Bu Kepala datang langsung dan itu sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi Bu Kepala, Bu Kepala BMKG dan jajaran yang ke Cilacap kemudian juga tidak hanya melakukan kegiatan untuk nelayan, tetapi juga gempa dan apa melepas tsunami dan juga apa itu ya, Bu, ya kemarin ya melepas anak-anak kura-kura ya penyu ya, di sana untuk lingkungan dan ini sama seperti Pak Eddy Santana karena pelatihan-pelatihan itu sih, karena mereka banyak di lapangan, kalau di gedung pasti seneng ya Bu ya.

Bosen kali kalau umpamanya mereka pelatihan di sini terus di lapangan terus gitu ya, kalau orang Cilacap bilang *neng kene neng kene* terus gitu ya. Jadi, kalau di gedung bagus sih pasti mereka senang gitu. Iya, bosan itu mereka kok *nggak* ada perubahan pelatihan dua hari biar mereka *refreshing* dan fokus dalam menerima.

Kemudian, apresiasi pastinya setiap tahun berharap ada pelatihan itu terus. Untuk para petani juga tahun depan juga diharapkan ada diklat untuk para petani karena tidak hanya gempa, tsunami, kemudian juga para petani membutuhkan juga pengetahuan-pengetahuan itu.

Kemudian untuk Basarnas juga terima kasih Pak Hendri karena sudah ada pelatihan di Banyumas dan Cilacap, gitu ya. Kalau dulu di Cilacap kemarin di Banyumas dan kita tahu anggarannya sangat sedikit. Kemudian SDM-nya juga kalau Basarnas kan sedikit ya Pak ya, tetapi dengan pelatihan ini membuat banyak relawan yang terlatih gitu, sehingga bisa membantu kekurangan dari para personil yang ada di Basarnas begitu juga dengan BMKG. Jadi, kalau saya secara makro sangat mengapresiasi. Yang penting sama seperti tadi yang disampaikan Pak Eddy, saya sepakat bahwa kecelakaan yang banyak itu kan di laut dan banjir, jadi apa yang program diadakan itu diperbanyak kepada segala sesuatu yang memang dibutuhkan. Demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Dari hadir fisik sudah selesai ya atau masih ada yang ingin bertanya? sudah cukup ya.

F-PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Pimpinan

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan.

F-PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Ada yang tertinggal tadi Pak Menteri ini, Pak Menteri Desa. Satu, tentang dana desa yang bisa digunakan untuk operasional Kepala Desa. Ini pernah kita suarakan tapi kita melihat kemarin ada semacam kabar gembiranya dari Pak Presiden, *nah*, seperti apa konkritnya?

Kemudian yang kedua Pak Menteri, ada kebijakan pemerintah daerah yang tidak seragam tentang gaji kepala desa dan perangkat desa. Ada yang 4 bulan mereka bekerja baru digaji, ada kadang 6 bulan. Jadi, kepastian ini mudah-mudahan pemerintah pusat, Pak Menteri dengan Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi agar memberikan tekanan kepada pemerintah daerah. Gaji mereka ini, gaji dan tunjangan mereka ini tidak lagi mereka terima per 4 bulan tetapi setiap bulan itu mesti mereka terima. Karena kita tahu bahwasanya Indonesia ini kalau tidak dari desa kita membangun, maka sesungguhnya tidak ada pembangunan Indonesia, terima kasih Pak Menteri.

F-P GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Pimpinan tambah sedikit untuk Kementerian Desa saya mau nanya yang 1,5 Triliun untuk pendamping desa itu.

KETUA RAPAT:

Belum saya izinkan Ibu, sudah ngomong.

F-P GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Oh ya, ya, *punten punten*.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-P GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Sudah diizinkan, ya? Manis banget. Pak Menteri apa yang 1,5 Triliun untuk pendamping desa, karena saya belum baca apakah itu *full* untuk apa gaji atau ada kegiatan-kegiatan sosialisasi lainnya? Kalau ada kegiatan sosialisasi atau semacamnya yang ada di desa-desa, saya berharap di Dapil saya gitu mitra bisa berkoordinasi dengan kita sehingga bisa sinergi di desa-desa itu, Pak Menteri, terima kasih.

Terima kasih Pak Ridwan, sebagai Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Novita, terima kasih, Pak Syahrul Aidi, makasih.

Baik, mungkin saya di meja pimpinan mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama untuk semua ya baik Pak Menteri Desa, kepala BMKG maupun BNPP. Saya mengingatkan ini terkait dengan *automatic adjustment* ini yang dilakukan oleh K/L atau mitra kerja Komisi V bersama-sama dengan Kementerian, kementerian Keuangan. Saya minta mungkin ada penjelasan, apakah dari Ibu atau siapa saja yang bisa lebih bagus ini. Atau informasi dari Kementerian Desa, BMKG, dan Basarnas tentang blokir internal, blokir internal tadi itu. Bila dinilai sudah saatnya dibuka apakah sudah ada ketentuan dari Kementerian Keuangan gitu artinya pemblokiran tadi itu. Apakah misalnya saatnya dibuka apa ada ketentuan dari Kementerian Keuangan pada saat dibuka, pada saat diblokir kemudian pada saat dibuka, apa ada ketentuan gitu.

Ini menjaga agar mitra kerja Komisi V tidak mendapat permasalahan saat akan menjalankan program yang seharusnya sudah boleh dilakukan blokir, sudah dibuka blokirnya. Jangan sampai ada yang terpaksa mengurus sendiri-sendiri, artinya mengurus blokir sendiri-sendiri. Yang padahal justru membuka ruang tersendiri gitu. Sebab kalau buka ruang sendiri pasti ada istilah, ada istilah lain lagi pada akhirnya hal lainnya lagi juga kita tuh agar tidak menjadi beban kinerja penyerapan K/L mitra Komisi V. Itu kira-kira untuk semuanya.

Yang berikutnya BMKG, pada saat Kunker Komisi V ke Bogor tanggal 16 juni 2021 lalu saat itu dipimpin Pak Arwani. Dari pihak BMKG mengutarakan nanti ada program ke pelibatan masyarakat dalam mendeteksi cuaca di wilayah-wilayah itu, ada beberapa itu. Perlu diklarifikasi dari BMKG apakah berbeda program tersebut dengan program sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang lainnya, karena di paparan BMKG pelibatan masyarakat dalam apa namanya mendeteksi cuaca belum terlihat di situ. Ataukah rincian program tersebut dimasukkan ke program yang mana, di beberapa BMKG.

Kemudian Menteri PDT, tadi karena saya ada di sini Pak, waktu rapat prioritas tadi saya tidak ikut. Terkait dengan nomenklatur jalan desa strategis pada menu kegiatan DAK, transportasi pedesaan agar disesuaikan dengan nomenklatur yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan. Dalam Undang-Undang Jalan, tidak ada nomenklatur jalan desa strategis, Pak. Yang ada adalah jalan antar desa atau jalan poros desa yang fungsinya adalah sebagai penghubung antar desa atau kawasan yang memiliki nilai strategis, itu Pak yang mungkin disesuaikan saja yang ada di Undang-Undang yang ada.

Barangkali itulah penyampaian pendalaman dari Anggota Komisi V. Selanjutnya, mungkin kami minta dulu jawaban atau tanggapan dari kita mulai lagi dari Kepala BNPP, biar lebih adil. Ya silakan Kepala BNPP.

**KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BNPP) /
BASARNAS (Marsekal Madya TNI HENRI ALFIANDI, M.Han.):**

Terima kasih Bapak Ketua telah memberikan kesempatan yang pertama untuk menjawab. Kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin nanti juga akan sekaligus menjawab pertanyaan Bapak atau Ibu keseluruhannya. Yang pertama, tadi masalah Bapak yang menanyakan tentang *drone* bawah air. Begini Bapak, jadi Basarnas sekarang sudah mengadaptasi sebuah peralatan sonar untuk pencarian korban tenggelam ataupun kapal yang tenggelam. Alatnya sudah teruji selama satu tahun ini, hanya memang pembeliannya tidak, belum menyeluruh karena kami harus me-RnD atau *riset and development*.

Alat itu adalah alat sonar yang bisa mendeteksi manusia dan cara kerjanya adalah memantulkan gelombang itu sesuai dengan tubuh manusia. Jadi, kalau itu bukan manusia atau bukan yang seperti manusia dia akan menunjukkan berupa *dot* lingkaran yang tidak *solid*. Yang kedua kami juga sudah melakukan *riset and development* tentang penggunaan alat pencari ikan sebetulnya *fish finder* yang kita buat sedemikian rupa untuk mempermudah.

Pertanyaan tadi adalah masalah *drone* bawah air, *nah*, kalau kita menggunakan *drone* bawah air kami masih menilai penggunaan peralatan ini tentu sangat mahal Bapak, sedangkan anggaran kita tidak mencukupi. Saatnya nanti mungkin anggaran cukup, kami akan melengkapi. Memang kalau *drone* bawah air ini cara pencariannya mudah Bapak, nanti tinggal mengeplot di GPS-nya koordinat-koordinat dan dia mencari secara otomatis, itu tanpa manusia. Sekarang kita hanya bisa menggunakan manual saja RoV, apa kapal-kapal manuver dengan peralatan yang sudah mulai kita pakai ini.

Dan, *alhamdulillah* tahun ini dari sisa anggaran sekali lagi dari sisa anggaran yang kita kumpulkan kita sudah membeli 80 set peralatan ini. Satu Aqua Eye namanya satu USD atau *Underwater Searching Device* dan lengkap dengan alat selamnya dan seluruh pos yang ada di Indonesia akan mendapatkan satu alat. Jadi, di mana titik-titik pos itu akan memiliki alat. Memang benar tadi yang disebutkan saya acak saja bahwa kecelakaan di Indonesia ini rata-rata di air. Saya setiap hari mendapatkan 20-an sampai 30 laporan, 70 sampai 80% mungkin sampai 90% adalah kecelakaan air.

Fokus kami memang mengarah kepada pembelian peralatan perlengkapan dan pendidikan tentang bagaimana me-*rescue* dan *searching* di air. Ini sudah kami lakukan bahkan tahun depan *insya Allah*, mulai tahun ini mungkin bisa kontrak. Kami sudah memesan kapal sebanyak 74 kapal *fast boat* dengan kemampuan 38 knot mampu menembus level atau *stage* 5, artinya 5 meter. Tadi, yang dikhawatirkan Ibu Sadarestu, mungkin tidak akan terjadi lagi dan memang betul bahwa, kita membutuhkan kapal-kapal cepat yang ringan ini Pak, dibandingkan kapal yang besar. Kapal yang 40, 60 kami nilai saat ini sudah cukup dan tidak lagi dibutuhkan. Mengapa? Yang pertama perawatannya tinggi, yang kedua efektivitasnya kurang, daya kecepatan untuk menolong juga kurang, kemudian butuh sumber daya manusia lebih, yaitu kita harus merekrut ABK-ABK. Kalau yang *fast boat* ini cukup 3 personil 12 meter

panjangnya. Ini siapapun kita latih langsung bisa cepat dan bereaksi dan mampu menembus ombak yang ekstrem artinya sampai 5, itu. Ini saja sekaligus Bapak.

Kemudian untuk Pak Aras, tentang luasan jangkauan, *eh*, pencarian dan pertolongan saya jamin Pak, bila nanti PLN pengadaan kapal cepat ini seluruh provinsi akan mendapatkan. Jadi, terutama tadi Bu Cen Sui Lan tadi di Anambas kami sudah dapat informasinya dan kami bagi-bagi kapal sebanyak 74 ini terbagi jadi dua jenis yaitu kapal Oceanic, yaitu yang di Samudra dan yang di kedalaman rendah seperti di sungai seperti itu, dengan perbedaan hanya kemampuan mesin, namun kemampuan elektronik kami minta ini sangat canggih Bapak-Ibu sekalian nanti. Radarnya mampu mencapai sampai *dua ra*, dua kilometer, peralatan pakai penglihatan malam, sonar center kiri-kanan ada, dan berkabin. Jadi, cukup maju kapal ini mudah-mudahan bisa kita realisasikan.

Untuk Pos SAR yang ada di Parepare sudah lengkap Bapak, kami hanya memohon dari Bapak-Bapak sekalian yang memiliki konstituen di daerah mungkin bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kami mintakan hanya tempat saja sebetulnya. Memang kami kekurangan dan kami sudah ada kerjasama dengan pemerintah daerah kami akan di-*support* oleh pos SAR pos Sar yang ada di daerah. Bahkan Satpol PP sudah kita latih sehingga nanti mereka menjadi pendukung kita, walaupun kita kurang kita menjadi inti per pos paling tidak tiga orang. Satu orang tapi mereka sudah terlatih dan standar. Ini jawaban untuk Bapak-Ibu yang ada di daerahnya yang masih ada kekurangan tempat.

Kemudian, untuk evaluasi dari Bu Sadarestu tadi, yang menanyakan tentang keadaan barang kita. Memang mungkin Bu Restu sudah dapat informasi ini memang keadaan *sparepart* dan lain sebagainya belum tertib dan kami sudah tertibkan. Kami sudah membuat gudang peralatan dan peralatan-peralatan tersebut keluar masuk juga sudah harus kami tertibkan sehingga kesiapan dari kapal dan helikopter kita terpenuhi.

Perlu diketahui bahwa kesiapan kapal kita meningkat Bapak, Bapak-Ibu sekalian. Tahun ini saja kita menyelesaikan rencananya 17 kapal yang di naik *dock*, kita bisa sampai 24 kapal. Bagaimana caranya saya jawab langsung tadi cara-cara bagaimana strategi dengan anggaran yang berkurang. Yang pertama, kita mengefisiensikan anggaran dan kita harus tahu betul dasar harga. Kemudian, kita atur itu para mitra dan kita atur juga keuntungannya sehingga yang tadinya kapal dengan apa, pembiayaan sekian bisa kita hemat hampir 30, 40 persen Bapak, setelah kita dapatkan.

Demikian juga dengan pemilihan helikopter, demikian cara-cara kita *me-me-*, strategi untuk mendapatkan kenapa anggaran yang kita kurangi kita masih tetap eksis. Kemudian, juga mendapatkan anggaran dari PLN yang tadi *backlog* mungkin Bapak ada yang tanya tadi sampai 1, *eh*, 2 Triliun. Ini kita mendapatkan PLN sudah masuk *green book* sebesar 1,7 Triliun. Itu akan kita belikan helikopter dan kapal yang 74, dari pembelian itu kenapa kok beli mahal, yang mahal karena yang sekarang anggarannya ada ini memang untuk *basic*

need, sedangkan anggaran yang kita dapatkan dari luar kita memenuhi *backlog* tadi.

Tuntutannya didapat kenapa untuk beli helikopter memang mahal Bapak, karena kami mendapatkan perintah dari pemerintah pusat untuk menyediakan kesiapsiagaan 5 *spot* helikopter yaitu untuk menunjang pariwisata di destinasi utama pariwisata ya, prioritas, itu yang harus kita penuhi di tahun depan. Mudah-mudahan ini sudah mulai, kami pun sudah tidak khawatir karena kemarin yang saya ceritakan helikopter yang mau tadinya mau dihapus bisa kami perbaiki dan dua sudah terbang. Jadi, kita mendapatkan kekuatan dari yang tadinya *missed* manajemen perawatan bisa kita koreksi dan sekarang dua sudah tambahan. Mudah-mudahan di dua bulan kemudian 3 helikopter yang tadinya mau kita hapus sudah bisa beroperasi.

Ini cara-cara kami untuk mendapatkan bagaimana kita menghemat dan juga sekaligus tetap mendapat, apa bisa memajukan atau melebihi dari target yang kita tentukan.

Kemudian dari tempat latihan, Pak Tamanuri, tadi ya tempat latihan untuk ini

KETUA RAPAT:

Orangnya sudah tidak ada, Pak. Jadi baiknya mungkin, kalau tidak ada orangnya langsung dijawab tertulis saja nanti, Pak.

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BNPP) / BASARNAS (Marsekal Madya TNI HENRI ALFIANDI, M.Han):

Siap.

KETUA RAPAT:

Kalau ada orangnya kita harus hargai boleh jawab langsung, Pak, silakan.

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BNPP) / BASARNAS (Marsekal Madya TNI HENRI ALFIANDI, M.Han.):

Siap, betul Bapak, tadi ada yang menanyakan *trend* kecelakaan di laut dan udara. Mohon maaf Pak, helikopter kita beli itu sebetulnya SAR ini punya beban tugas lain kecuali mencari orang dalam, kita *emergency* ada satu lagi tugas transportasi, Pak. SAR ini harus dilengkapi ada di Indonesia karena kita mengikuti ICO dan juga IMO, *nah*, ICO dan IMO ini wajib ada jadi kita harus menyiapkan peralatan tersebut. Lain-lain tidak ada yang mungkin belum ada yang eh tidak ada yang tertinggal sebentar lagi ya.

Saya kira itu Bapak, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kami minta dukungan sekali lagi kepada Bapak-Bapak Ibu Komisi V sekalian. Basarnas sampai sekarang dalam anggaran dengan 1,7 ini, kami nyatakan ini

adalah batas limit kami. Kalau tahun depan berikutnya kurang dari sekian mungkin kami harus, ya, bekerja saja Pak, tidak ada tambahan sama sekali 1,7 ini kami hanya belikan peralatan yang *basic need*, Pak. Seperti alat selam, pakaian ya seperti itu, tidak ada pertambahan sama sekali. Pertambahan yang utama atau menambahkan kemampuan yang sifatnya menambah, ini hanya *me-maintain* kemampuan kami.

Gitu Pak, jadi mohon diketahui mudah-mudahan Komisi V, Bapak-Bapak, Ibu sekalian bisa menyampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan, supaya anggaran kita sesuai dengan kemampuan kita meningkat dan juga apa peralatan juga bisa kita tambahkan yang lebih seperti yang diinginkan Bapak-Ibu sekalian, lebih canggih lagi. Sekian terima kasih Bapak-Ibu sekalian mohon maaf bila ada kekurangan atau kurang jelas, kami mohonkan maaf.

Sekian siap terima kasih, Bapak.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak, jadi kalau dibawah 1,7 padamu negeri pada akhirnya, kita (suara kurang jelas) padamu negeri. Baik, Ibu Kepala BMKG silakan, Bu.

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA RI (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc. Ph.D.):

Terima kasih Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR RI dan Bapak Pimpinan Komisi V DPR RI, atas seluruh pertanyaan dan masukan.

Yang perlu kami sampaikan di sini adalah ada beberapa hal, misalnya tadi ada pertanyaan untuk membuka internal blokir, ya. Masihkah ada ketentuannya untuk dapat membuka tersebut. *Nah*, sampai saat ini kami masih diminta untuk menunggu dan sampai saat ini tidak disampaikan ada ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi, kami masih menunggu sifatnya seperti Kementerian dan Lembaga yang lain juga demikian. Jadi,

KETUA RAPAT:

Ibu, takutnya saya, misalnya blokir seperti itu, kalau dari PDT misalkan mengadakan pendekatan sendiri itu bisa dibuka. Kalau Ibu tidak mengadakan pendekatan tidak bisa dibuka. *Nah*, itu maksudnya membuka ruang komunikasi yang kadangkala bisa melahirkan yang negatif pikiran orang lain. *Nah*, kalau ada aturannya misalnya terblokir seperti itu, ada aturannya maka, berarti kan secara kebersamaan, secara sama-sama kan dibuka lembaga manapun dibuka secara bersama-sama, tapi kalau masing-masing dibuka itu pertanyaan akan muncul gitu, kira-kira itu pertanyaannya Bu, terima kasih.

**KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA RI
(Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc. Ph.D):**

Baik, baik Pak, nanti perlu kami dalami lagi, yang jelas sepertinya tahun lalu juga terjadi, jadi kami sifatnya menunggu kemudian misalnya.

KETUA RAPAT:

Pertanyaan, kalau, kalau pembukaan blokir begitu secara menyeluruh dibuka atau satu-satu dibuka?

**KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA RI
(Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc. Ph.D):**

Tahun lalu belum apa sudah yang gaji? Yang gaji? Ternyata blokir itu baru kali ini.

KETUA RAPAT:

Baru kali ini?

**KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA RI
(Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc. Ph.D):**

Iya, iya jadi belum tahu Bapak, kami, akan mencoba untuk menggali informasi lagi tentang hal tersebut ya, tapi terima kasih diingatkan.

F- P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

Izin Pimpinan, izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Hamka.

F- P. GOLKAR (DRS. HAMKA B. KADY, MS):

Terhadap blokir ini Pak Ketua, tidak sama-sama semuanya, artinya di setiap lembaga itu berbeda-beda. *Nah*, oleh karena itu, tergantung kebutuhan Kementerian Keuangan untuk menarik anggaran itu seberapa besar. Baru dialokasi kepada badan atau lembaga lain. Jadi, misalnya anggaran BMKG bisa saja dibuka tidak dibuka di Basarnas, bisa, bisa juga sebaliknya.

Nah, oleh karena itu, saran Pimpinan tadi sebaiknya memang seluruh mitra kerja kita Pak Ketua, apa yang diblokir tolong kodenya apa, kemudian pada saat nanti saya ketemu dengan Menteri Keuangan itu akan kami informasikan karena itu merupakan hal penting bagi kemitraan kita *gituloh*, Pak.

Saya kira demikian, ada Ibu Novi di sini, BURT berbeda juga blokirnya. Blokirnya kita berbeda juga sampai sekarang belum dibuka juga, tapi setengah-

setengah dibuka, *nah*, tergantung bagaimana kita mau menyampaikan ini bukanya setengah-setengah atau buka secara keseluruhan *gituloh*, Pak Ketua. Jadi, menarik kalau memang seluruh kemitraan kita nanti itu bisa memberi informasi kepada kami, karena dalam waktu singkat juga kami akan bisa rapat dengan Menteri Keuangan khususnya kami di badan anggaran, pasti akan kami sampaikan, terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke, informasi bagus Pak, ya Bu, dari Pak Hamka. Supaya kalau memang ada yang diblokir seperti itu bisa disampaikan informasi ke Pak Hamka. *Nah*, kemudian waktu rapat di Banggar Pak Hamka akan mengungkap itu. Kepentingan Pak Hamka adalah satu, bagaimana Komisi V tidak terganggu dalam menganggarkan buat kepentingan rakyat. Saya kira itu Pak Hamka, ya. Itu kira-kira, silakan Bu, silakan Bu.

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA RI (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc. Ph.D):

Terima kasih sekali ini apa, ya, dukungan dari Komisi V tapi memang benar Pak, sampai sekarang belum dibuka. Yang kami maksud di sini blokir itu adalah yang sebetulnya untuk pembayaran tukin, ya. Jadi, bukan *automatic adjustment* yang tahap 1 dan tahap 2 itu, itu memang sudah tidak akan kembali tetapi kalau yang 50% tukin yang belum terbayarkan, *nah*, itu yang diharapkan suatu saat akan dibuka. Namun kami, kami belum tahu ini nanti kami dalam lagi demikian.

Baik, kemudian yang selanjutnya adalah tadi masukan dari Ibu Estu. Ini masih *lenggah* di sini, terima kasih sekali Ibu Estu memberikan apa arahan. Jadi, strategi kami yang saat ini sedang kami jalankan adalah konsultasi dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri. Karena ini, saat ini yang pegang kendali kan pihak *lender*, pihak lender dan itu tadi istilahnya kami tidak bisa melangkah sebelum *lender* itu mengeluarkan *no objection letter*.

Nah, untuk hal tersebut karena ranahnya sudah di eksternal sehingga kami sedang berkonsultasi, untuk sementara kami memang masih menunggu dan kami mencoba juga pendekatan ke duta besar. Namun karena saat itu atau sampai saat ini, di apa, belum berhasil kami bertemu juga dengan duta besar karena kebetulan waktu itu kan sedang *summer, summer holiday*. Jadi, mungkin kami harus mencoba lagi ini, biasanya jadi kejadian ini *tuh* sebenarnya tidak hanya kali ini tadi ada Ibu yang juga menyampaikan itu kan tahun lalu juga memang benar, Bu.

Jadi, acara sepertinya menjadi setiap tahun, seperti itu, karena tahapnya memang sangat panjang. Proses lelang aja kalau normal enam bulan kalau *nggak* ada blokir. *Eh* apa, kalau tidak ada nol-nol seperti itu.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Pimpinan mohon izin, Pimpinan, Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Bu.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Terima kasih Ibu, mungkin, mungkin dari BMKG, Ibu bisa menunjuk apa ya semacam LO lah yang memang khusus untuk menangani itu. Jadi, fokus untuk menangani itu sehingga apa tentunya diambil orang yang pintar untuk ya punya punya kapabilitas untuk melakukan, apa namanya *lobby*, melakukan *lobby*, ya. Saya kira itu memang harus dilakukan karena kalau tidak ini sudah masuk triwulan ke-3 loh, Ibu. Ini sudah sudah apa perjalanan ini sudah pendek sekali. Kalau tidak dikejar saya khawatirnya tidak tercapai dan tidak terserap gitu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Bu.

**KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA RI
(Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc. Ph.D):**

Betul sekali yang disampaikan Ibu Sadarestu. Kami memang ada LO-nya yang khusus untuk melakukan *lobby* tersebut namun mohon maaf belum berhasil dan penyebabnya *tuh* sebetulnya *root*-nya pernah kami sampaikan mungkin tahun lalu ya, atau awal tahun ini ke Komisi V ini adalah persoalan teknologi, di mana, ini mohon maaf, tahun lalu sudah kami sampaikan ya, tahun lalu Ibu Cen Sui Lan yang menyampaikan radar untuk Natuna dan itu adalah salah satu yang menjadi penyebab, karena pihak *lender* memaksa kita harus mengganti radar tersebut dengan apa, ya, spek yang menurut kami di bawah. Yang jangkauannya harusnya 400 kilometer ini hanya sekitar 150 sampai 200 kilometer. *Nah*, kalau itu kami ikuti demi nolnya cair, demi *project*-nya berjalan kami bisa dianggap merugikan negara, karena kan harusnya 400 kilo. Natuna itu kan lautnya sangat luas kalau radarnya hanya pendek itu, dia tidak bisa menjangkau.

Jadi, penyebabnya itu dan sebetulnya teknologi yang diusulkan di dalam project ini kan diusulkan Tahun 2017. Artinya kalau itu kita turunkan lagi pastinya teknologi yang sudah kadaluwarsa. Tahun 2017 sekarang Tahun 2022 kalau masih harus ditawar diturunkan. Jadi, persoalan itu yang nampaknya belum selesai sehingga kami memohon ke Kementerian Keuangan, Bappenas dan tentunya Kemenlu untuk membantu hal ini, yah semoga saja ada jalan keluar di situ.

Kemudian juga yang World Bank, World Bank itu prosedurnya memang panjang juga. Jadi, barangkali yang mekanisme lelangnya juga harus menyesuaikan aturan dari World Bank. Jadi, sebetulnya kami sudah menyiapkan tahun lalu untuk lelang dengan mekanisme kami yang sifatnya lebih terbuka. Lebih terbuka membuka kesempatan bagi apa, apa ya, artinya lebih terbukalah poinnya namun ternyata itu tidak diizinkan dalam arti sudah ada prosedur yang harus diikuti sesuai *guideline* World Bank. Jadi, memang ada tahap prakualifikasi, kualifikasi bertahap.

Mungkin ada yang memaknai seakan-akan menjadi kurang tapi *insya Allah* masih tetap terbuka *insya Allah*. Jadi, hal itu yang terus terang banyak hal yang membuat ini menjadi apa, kurang lancar. Kemudian, program pemberdayaan masyarakat yang tadi disampaikan saat di Bogor. Untuk mampu berpartisipasi dalam mendeteksi cuaca ini sebetulnya adalah melibatkan masyarakat dengan menggunakan *gadget* untuk ikut memberikan laporan kondisi cuaca, dan ini-ini yang kami sebut sebagai teknologi 5.0, yang tadi ada pertanyaan, apa sih bedanya program sebelumnya dengan yang diusulkan kali ini.

Kalau sebelumnya itu kan 4.0 jadi teknologi yang digital tapi arahnya hanya dari kami ke publik. Kalau yang 5.0 ini melibatkan aspek sosial, jadi ada respons dari publik ke kami dan hasilnya itu dimasukkan di dalam algoritma untuk meningkatkan akurasi dari prakiraan dan prediksi BMKG khususnya cuaca. *Nah*, untuk pelatihannya ini akan dimasukkan bagian dari sekolah lapang Bapak-Ibu. Jadi, ini sebetulnya pelatihannya sangat *simple* mengajari masyarakat caranya menggunakan *gadget* untuk melaporkan.

Yang, yang rumit adalah algoritma-algoritmanya, *nah*, sehingga bagian dari sekolah lapang dan juga kami ada program khusus mozaik, yaitu pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam apa, pengamatan cuaca ini ada program khusus juga. Namun yang secara lebih masif adalah melalui sekolah lapang. Ini mohon dukungannya, terima kasih dan juga tadi banyak masukan yang penting bagi kami terkait sekolah lapang. Kami mohon maaf, kalau di lapangan ternyata ada yang berbeda karena yang lain-lain itu 150 Bapak, dan kami memang tidak di hotel. Bu Novi, mungkin bisa tidak di hotel. Makanya saya tadi kaget *loh* hotel bintang 5 lagi, tapi *oh* ya, kalau Ibu akan mau ke hotel nanti kami upayakan mungkin bintangnya tidak 5 Bu, karena anggarannya terbatas ini ya.

Jadi waktu itu filosofi kami adalah saya sengaja menyampaikan ke teman-teman di daerah daripada uangnya untuk membayar hotel lebih baik itu ditambahkan untuk langsung ke masyarakat begitu, tapi konsekuensinya jadi tidak di hotel, Pak. Nanti kami mainkanlah caranya bagaimana agar ada hotel tapi tidak mengurangi, tidak mengambil dari 150 itu. Ini PR kami *insya Allah* tapi poinnya terima kasih masukan Bapak-Ibu.

Kemudian juga tadi ada masukan yang sangat penting tentang renovasi atau ya, menyiapkan stasiun yang memadai. Dari 190 stasiun yang ada di BMKG, tercatat 36 stasiun yang harus diperbaiki, direnovasi, dibenahi, atau dibangun ulang ada 36 stasiun dan yang saat ini yang kami usulkan untuk

dilakukan renovasi itu 27 stasiun, untuk Tahun Anggaran 2023 nanti. Jadi, dari 27 ini tersisa masih ada sekitar 9 stasiun, kami akan alokasikan di Tahun Anggaran berikutnya. Karena, kami lihat kondisinya masih bisa masih cukup memadai kecuali yang 27 ini harus *rescue* segera.

Nah, kemudian tentang pergeseran anggaran itu belum kami lakukan Ibu, justru kami ini sedang mengajukan permohonan persetujuan. Jadi, kami tidak melakukan tapi itu suatu usulan dengan justifikasi, terus terang kami dengan analisis, kami proyeksikan Tahun 2030 nanti, dampak perubahan iklim ini akan semakin lebih serius, misalnya dari data kami apabila kita gagal melakukan adaptasi, mitigasi perubahan iklim akan terjadi kenaikan suhu yang lebih tinggi misalnya setengah derajat celcius, hujan ekstrem akan semakin sering, semakin intensif, dan durasinya panjang. Namun, meskipun peralatan sudah kami tambah tetapi kapasitas SDM ini sepertinya sudah bertahun-tahun kurang, kurang *ter-support*, jadi, akumulasi beberapa tahun di mana pengembangan SDM ini menurut kami masih kurang. Terbukti yang S3 saja masih kurang dari 50, sehingga agar mampu daya analitiknya meningkat, kami mohon izin diperkenankan untuk menyiapkan mereka melalui antara lain studi S3, kemudian juga pelatihan-pelatihan, *internship*, dan juga ada yang kami titipkan untuk bekerja di badan internasional, agar terangkat (*suara kurang jelas*) *skill*-nya. Jadi, demikian itu alasannya tapi nanti keputusannya memang kami ini tidak berani melangkah apabila tidak ada persetujuan, demikian.

Kemudian, di sini saya rasa sebagian besar sudah kami sentuh, untuk hal-hal yang belum dapat kami sampaikan, mungkin terlewatkan kami akan tuliskan di sini. Ini karena ada beberapa pertanyaan yang sama. Oh ya, tadi pengawalan, itu saya mohon maaf barangkali saya salah ucap istilahnya bukan pengawalan.

F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Izin, izin, Pimpinan, *nggak* usah dijawab itu.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Eddy.

F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Cuma masukkan aja, Bu.

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA RI (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc. Ph.D):

Oh baik-baik ya, baik terima kasih, tapi saya mohon maaf sebetulnya saya salah ucap yang betul itu ada menandatangani pakta integritas kesepakatan bersama untuk apa, ya itu tadi kerjasama seperti itu. Jadi bukan dikawal ini, terima kasih atas apa koreksinya. Kemudian juga saya rasa sudah *nih* ya, penyebab realisasi rendah tadi sudah disampaikan, banyak pertanyaan itu sudah kami sampaikan. Baik, demikian Bapak mohon maaf bila masih ada

kekurangan *insya Allah* kami akan terus berupaya untuk lebih baik lagi, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Kalau mau tidak repot di World Bank sebenarnya paling gampang. Pakai APBN murni saja, Bu. Silakan, Pak Menteri.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI (Dr. (HC) Drs. A. HALIM ISKANDAR, M.Pd):

Terima kasih, Pak Ketua.

Pertama, terkait dengan kemiskinan ekstrem, sudah mengeluarkan dua keputusan Menteri, yang pertama terkait dengan data, yang kedua operasionalisasi Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kemiskinan Ekstrem. Adapun yang ukuran kemiskinan ekstrem ini pada dasarnya adalah penghasilan per warga, per hari, setara dengan 11.633, ini BPS. Sehingga dinyatakan miskin ekstrem itu ketika penghasilan per hari, per Anggota keluarga, itu di bawah 11.633. Kami sepakat dengan Pak Syahrul, tadi. Miskin itu memang ada dua kita mengkategorikan, baik ekstrem maupun tidak ekstrem tapi khususnya untuk ekstrem itu ya sudah miskin, sendirian dirumah, berpenyakit kronis menahun, pokoknya numpuklah, numpuk itu, itu masuk dan kita sepakat. Saya selalu mengatakan bahwa, cuma ini belum disepakati. Saya selalu mengatakan bahwa kalau miskin seperti ini *nggak* usah ngomong pemberdayaan, jadi negara harus hadir bagaimana dia sehat, bagaimana dia kebutuhan makan setiap hari terpenuhi dan seterusnya.

Nah, yang di luar itu harus bicara tentang pemberdayaan, ketika definisi ini disepakati maka BLT dana desa, itu hanya menjadi sapu jagat untuk warga yang belum menerima apapun dari kebijakan pemerintah. Dan, sebenarnya sejak awal BLT arahnya ke sana bukan untuk *numpuki* apa yang sudah dimiliki. Itulah makanya pendataannya dilakukan secara langsung oleh relawan desa, relawan covid, untuk pendataan warga miskin dan tidak harus dibatasi oleh NIK. Karena kalau dibatasi NIK sementara warga masyarakat menyatakan bahwa itu adalah penduduk di situ ya sudah. *Nggak* peduli punya NIK atau *nggak* punya NIK. Asal dia memang memenuhi syarat untuk menerima dia harus dikasih. Ini supaya tidak sampai ada warga membutuhkan kehadiran negara tapi tidak bisa karena tidak punya NIK. Padahal mereka tidak punya NIK tidak semata-mata karena kesalahan warga itu sendiri.

Kemudian, terkait dengan dana desa untuk operasional desa sudah dalam proses harmonisasi, Permendes tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. *Insya Allah*, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Presiden 3%.

Kemudian terkait dengan pemanfaatan dana untuk pendamping, ya pasti pada hakekatnya adalah untuk kepentingan pendampingan dan pengawalan penggunaan dana desa dan tentu dana desa tidak akan pernah

lepas dari dua hal. Yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua peningkatan sumber daya manusia.

Terkait dengan BLT, yang minimal 40%, ini informasi yang kita terima apa *legal standing* terkait dengan perintah Pak Presiden untuk minimal 40% bukan, *eh* maksimal 40%. Itu sudah ada di meja Bu Menteri Keuangan, yang isinya antara lain dialokasikan yang kurang dari 40%, dialokasikan untuk ketahanan pangan. Memang hari ini arahan Presiden fokus pada ketahanan pangan, termasuk kemarin misalnya terkait dengan aspirasi pemanfaatan dana desa untuk infrastruktur yang tidak berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM, itu kita kasih ruang di desa mandiri sesuai dengan aspirasi yang berkembang. Sehingga dana desa bisa dipakai untuk renovasi kantor desa dan seterusnya, tapi syaratnya adalah desa mandiri, itu menjadi tidak jadi kita masukkan dalam kebijakan karena ada surat dari Pak Presiden, agar dana desa fokus untuk ketahanan pangan pada hari ini dan tentu terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Sehingga, kita kembali infrastruktur boleh tapi yang bersentuhan langsung dengan urusan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM.

Terkait dengan Periodisasi Kepala Desa, tentu akan kita terus perjuangkan dan aspirasi ini memang sangat kuat di bawah. Kemudian untuk transmigrasi 20% dari Pagu Anggaran, tentu ini akan kita lihat ketika tidak mengganggu capaian IKU untuk program-program yang lain. Jadi, kunci kita adalah IKU, Indeks Kinerja Utama supaya apa yang menjadi target RPJMN, target RPJP, itu betul-betul bisa kita wujudkan tetapi pada intinya kita sepakat agar seluruh potensi ini lebih memperkuat pada kepentingan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM di desa. Ini yang menurut saya sangat penting dan segera kita tindak lanjuti.

Terkait dengan buka blokir tadi sudah disampaikan dan memang kenyataannya begitu sampai hari ini kita juga belum ada yang dibuka ajuan kita. Terus rekomendasi untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Desa pasti akan kita tindak lanjuti. Diksi-diksi yang akan kita pakai pasti akan kita konsultasikan dengan diksi yang ada di Undang-Undang Desa. Selebihnya, nanti akan kita laporkan secara tertulis, terima kasih, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Menteri, Bu Kepala BMKG, Bapak Kepala BNPP.

Selanjutnya, kita masuk pada kesimpulan sekarang, coba kesimpulan tayangkan.

Draf kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas, 24 Agustus 2022.

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, BMKG, dan BNPP terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Selanjutnya komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, BMKG, dan BNPP untuk mempertahankan capaian kinerja dan opini tersebut di tahun-tahun mendatang.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, BMKG, BNPP, untuk meningkatkan capaian serapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sesuai saran masukkan Komisi V DPR RI. Di mana capaian per bulan Agustus 2022 sebagai berikut, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 48,08%, realisasi fisik 50,01%. BMKG 40,11% realisasi fisik 43,69%. BNPP 46,02 Realisasi Keuangan, sementara Realisasi Fisik adalah 52,83%.
3. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, BMKG, dan BNPP terhadap alokasi anggaran masing-masing Kementerian, Lembaga dan RAPBN Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan surat Bappenas, *eh* surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas Nomor S617/MK.02/2022 dan B577/M.PPN/D.8/PP0402/07 Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022 sebagai berikut.
 - a. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Pagu Kebutuhan Rp5.289.104.448.000, Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.997.030.851.000 selisihnya adalah kurang lebih 2,29 Triliun. Kedua, BMKG Rp3.398.000.284.000 Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023 Rp3.010.572.747.000. Selisihnya adalah Rp387.711.253.000. Ketiga, BNPP, Basarnas Pagu Kebutuhan 3.625.265.694.000 Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.888.027.534.000. selisihnya kurang lebih 1,7 Triliun.

Selanjutnya, Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, BMKG, dan BNPP akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai Pagu Kebutuhan melalui mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN di DPR RI.

4. Komisi V DPR RI meminta BMKG agar dalam melakukan pergeseran anggaran antar program lebih fokus pada kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM BMKG sebesar 50 Miliar untuk akselerasi pengembangan kapasitas SDM BMKG.
5. Yang kelima, yang kelima ini adalah tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Menteri PDT yaitu Komisi V DPR meminta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk meningkatkan alokasi anggaran sektor transmigrasi sebesar 20%. Apakah ini masih perlu kita masukkan ke nomor 5? Atau cukup dengan penjelasan Pak Menteri tadi? Cukup penjelasan Menteri. Jadi, berarti 20 kita hilangkan, kita *drop*. Tolong *drop* nomor 5, selanjutnya silakan, Pak.

F- P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Izin Pimpinan, nomor 4 juga apa yang kita belum bahas kok apakah sudah memberi persetujuan pergeseran itu? Ya, saya kira tidak perlu dulu, di-drop juga dulu,

KETUA RAPAT:

Setuju?

F- P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Ya, ini kan baru penyampaian belum kita bahas secara detail persetujuannya.

KETUA RAPAT:

Bagaimana teman-teman setuju? Setuju ya. Teman-teman Anggota setuju, ya? Drop nomor 5. 1, 2, 3, 4, setuju? Setuju, ya. Bagaimana dengan pemerintah? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, selanjutnya pada kesempatan ini kami juga sampaikan Rekapitulasi Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021/2022 baik kunjungan kerja spesifik maupun kunjungan kerja reses. Kita langsung serahkan ya, kami undang dengan hormat ke depan tiganya.

Pimpinan Anggota Komisi V DPR RI, Menteri dan para Kepala Badan yang kami hormati,

Dengan telah disepakati kesimpulan dan keputusan tersebut maka rangkaian acara Rapat Kerja RDP pada hari ini telah kita selesaikan. Kami mohon maaf apabila, iya, apabila ada yang kurang berkenan selama berlangsungnya rapat. Sebelum rangkaian acara rapat hari ini ditutup kami berikan kesempatan kepada Menteri, untuk menyampaikan sambutan penutup.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI (Dr. (HC) Drs. A. HALIM ISKANDAR, M.Pd.):

Terima kasih .Pak Ketua dan seluruh Anggota Komisi V. Mewakili Ibu Kepala BMKG, Bapak Kepala Basarnas dan tentu dari Kementerian Desa menyampaikan terima kasih atas segala yang disampaikan di dalam forum rapat kerja hari ini dan juga tentu kami akan segera menindaklanjuti apa yang sudah menjadi keputusan rapat pada siang hari ini, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Demikianlah, rangkaian acara rapat pada hari ini telah kita selesaikan, semoga hal yang telah kita diskusikan dan kita putuskan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, *amiin*. Dengan demikian, maka Rapat Kerja RDP pada hari ini dapat kita tutup dengan ucapan terima kasih dan *wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.00 WIB)

JAKARTA, 24 Agustus 2022

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002